



VOLUME XI | NO. 100 / JANUARI 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

edisi
100

kaleidoskop
2015



Secara simbolis, Menteri Keuangan meluncurkan Obligasi Ritel Indonesia seri ORI012 yang mengusung tema "Terumbu Karang, Investasi Masa Depan", di aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9)

Fotografer
Dok. KLI
Teks
lin Kurniati

Daftar Isi



- 5 **Dari Lapangan Banteng**
- 6 **Eksposur**
- 10 **Lintas Peristiwa**

Wawancara

- 27 Juzhong Zhuang: Kebijakan Fiskal yang Berperan Vital
- 31 Sri Adiningsih: Terus Jaga Kepercayaan Pasar

Spesial 100 Edisi

- 44 100 Edisi Untuk Ekonomi Negeri
- 46 Media Keuangan di Mata Mereka

Generasi Emas

- 49 Mahasiswa Indonesia di Markas Energi Dunia

Kaleidoskop

- 12 Infografis
- 15 Kita Tidak Krisis
- 18 Evaluasi di Berbagai Lini Ekonomi
- 19 APBN Kita: Kini dan Nanti
- 22 Telaah Kritis APBN 2015
- 23 Berlari Mengejar Target Pajak
- 33 Waktunya Memperkuat Sang Penyokong
- 36 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dari Desa
- 39 Paket Stimulus Gairahkan Ekonomi
- 43 Paket Kebijakan Ekonomi dan Masa Depan Indonesia

Renungan

- 50 Harga Jual Menjadi Acuan PPnBM Rumah Mewah

Renungan

- 52 Cerita di Meja Makan

Buku

- 53 Blusukan di Negeri Kincir Angin

Jalan-jalan

- 54 Jelajah Sulawesi Selatan

Selebriti

- 56 Berantas Korupsi Lewat Seni
- 57 Bung Piskal

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. **Ketua Pengarah:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardianto, Fery Gunawan. **Redaktur Unit Eselon I:** Arief Rahman Hakim (DJBC), Pilar Wirotama (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), M. Hijrah (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Noer Anggraini (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). **Redaktur Foto:** Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. **Tim Redaksi:** Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Ahmady Muhajiri, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekt, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiasnya.

Ruang Pelayanan Terpadu Daerah

Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah merupakan wujud nyata reformasi birokrasi DJPK di bidang pelayanan publik, yang bertujuan mengakomodir seluruh kebutuhan stakeholder DJPK secara terpusat, terorganisir, dan tertib. Sistem manajemen pelayanan tamu yang telah diterapkan telah memenuhi dan memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2012.

Standar Pelayanan Tamu:

1. Tamu dilayani dengan cepat/waktu yang pasti (10 menit)
2. Tamu dilayani oleh Petugas/Konsultan yang memiliki kompetensi
3. Setiap konsultasi tamu selalu terekam dalam Berita Acara Konsultasi
4. Ruang layanan yang nyaman, aman dan transparan (dilengkapi CCTV)



Hari Baru di Depan Kita

Tak terasa, tahun 2015 telah terlewati. Kini saatnya memulai lembaran baru di tahun 2016. Awal tahun ini, majalah Media Keuangan terhitung memasuki edisi ke-100. Tentunya hal ini membuat redaksi lebih bersemangat dalam menyusun liputan ekonomi bagi publik di hari-hari baru selanjutnya.

Mengawali tahun 2016, akan dibahas mengenai topik ekonomi yang menjadi *highlight* di tahun sebelumnya. Ada lima besar topik ekonomi yang menjadi topik utama sepanjang tahun 2015. Topik tersebut membahas mengenai kilas balik ekonomi, paket kebijakan ekonomi, perpajakan, dana desa, dan tentunya APBN.

Sepanjang tahun 2015, pemberitaan di media mengenai kinerja ekonomi Indonesia tidak terlalu positif. Kelesuan dan ketidakpastian ekonomi global mendominasi dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian tanah air. Sepanjang kuartal I hingga kuartal III, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4 persen. Angka ini relatif tidak tinggi, tapi sebenarnya tergolong baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sementara, untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang berimbas pada perlambatan

ekonomi dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan 7 rangkaian paket kebijakan ekonomi. Diharapkan, seluruh paket kebijakan yang telah dan akan diluncurkan dapat menciptakan kondisi ekonomi makro yang sehat, menggerakkan ekonomi perdesaan dan nasional, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.

Perpajakan menjadi isu tinggi juga di tahun 2015. Tentunya pemerintah masih berharap masyarakat mengetahui betapa besar peranan pajak bagi pembangunan nasional. Berbagai gebrakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya *gijzeling* untuk memburu pengemplang pajak, mengadakan tahun pembinaan wajib pajak, hingga memberlakukan peraturan barang mewah bebas pajak.

Selain itu, sesuai dengan nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, maka penyaluran dana desa menjadi salah satu tugas Kementerian Keuangan. Hingga 13 November 2015, dana desa

yang sudah disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) baru mencapai Rp6,2 triliun. Bahkan, dari 434 kabupaten/kota, baru 244 yang melaporkan penyaluran dari RKUD ke RKD.

Terakhir, untuk isu APBN, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro optimis dapat mengendalikan defisit di seputaran 2,5 persen. Pada APBNP 2015 terdapat sejumlah terobosan yang tidak terdapat pada APBN tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dengan penambahan dua indikator selain tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan, yaitu gini rasio dan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua indikator tersebut menjadi sinyal agar pemerintah juga fokus terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Akhir kata, mari bersama-sama menyambut hari baru dengan semangat yang baru.

tweet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Sepanjang tahun 2015, terdapat 5 isu besar Kemenkeu, yaitu APBN, Perpajakan, Paket Kebijakan Ekonomi, Dana Desa, dan perekonomian Indonesia. Dari kelima isu tersebut, sampaikan optimisme Anda di salah satu tema.

Trizar Rizqiwani @trizarrizq

Dana Desa kayanya bisa bagus kalo pemetaan potensi daerah dilakukan dgn benar, implemntasi dan pengawasannya jg benar

Dandelion @dendoniii

Perpajakan sih menurutku, karna smua kebijakan pada akhirnya bermuara ke

pendapatan negara, terus support!

Priyanda Bagus P @Supriyanda

konsep deficit budgeting APBN 2016 merupakan slh satu pondasi kuat utk ekspansi fiskal negara. Defisit tak slh buruk.

Egi @ageefm

semoga partisipasi

msyrkt dalam negeri di SBN semakin tinggi, agar manfaat non discretionary spending kembali ke mrk, bkn asing dan memitigasi risiko capital outflow

Farisa Badres @chabadres

jika diimplemntasikan scr serius maka optimis paket tsb tidak hny dpt menunjang penguatan ekonomi

dlm jgk pendek tp jg scr berkesinambungan memperbaiki sendi2 ekonomi nasional scr "fundamental" dlm jgk pnjg. Ini yg plg penting

Iwan hardiyanto @choohard

5 isu besar kemenkeu akan mengubah Indonesia, secepatnya, jika semua berjalan lurus pada jalur ya



Berbagi Pengetahuan

Foto
Yoyon Daryono

Sekelompok anak sekolah dasar di Bandung berinteraksi dengan dua orang pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam rangkaian kegiatan Festival Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di stan DJPB, para pengunjung mendapatkan berbagai pengetahuan seputar tugas pokok dan fungsi serta layanan direktorat jenderal tersebut.



DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
Menjadi pengelola keuangan negara tingkat dunia





Wayang golek sudah menjadi bagian dari hidup Abah Entang selama hampir 50 tahun. Kini, dia mengabdikan

diri di pusat pembuatan wayang golek di Bogor, Jawa Barat. Dalam usia yang sudah tak lagi muda, Abah Entang masih menjaga rasa cintanya pada bentuk kesenian tradisional yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan itu.

Yang Sayang Wayang

Foto
Tino Adi
Prabowo





Kemenkeu Raih Prestasi di Anugerah Media Humas

18/11

Teks Dwinanda Ardhi
Foto Bagus Wijaya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih dua penghargaan pada Malam Anugerah Media Humas yang diselenggarakan di Surabaya, Rabu (18/11). Pada kategori Laporan Kinerja Humas, Kemenkeu raih Juara I. Kemenkeu berhasil mempertahankan prestasi yang didapatkan pada tahun lalu setelah bersaing dengan berbagai kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perguruan tinggi negeri lainnya. Penghargaan kedua diraih dari stan pameran. Tampil menonjol dengan desain dua lantai, stan Kemenkeu dinobatkan sebagai Stan Favorit.

18/11

Teks Dwinanda Ardhi
Foto Bagus Wijaya

Kemenkeu Kian Aktif di Forum Bakohumas

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melantik pengurus Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) periode 2015-2020 di Surabaya, Rabu (18/11). Dalam kepengurusan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kemenkeu N.E. Fatimah dilantik sebagai Wakil Ketua III. Kemenkeu memang tergolong aktif pada forum Bakohumas. Pada ajang temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015, Kemenkeu menjadi salah satu kementerian yang turut membangun stan pameran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sempat mengunjungi stan tersebut.



Investor Gathering dan Pameran Investasi Keuangan 2015

07/12

Teks DJPPR
Foto DJPPR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan kegiatan investor gathering dan pameran investasi keuangan 2015 pada Senin, (7/12) di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan. Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Gubernur Jawa Timur. Pameran investasi keuangan ini juga dimeriahkan oleh 20 bank dan sekuritas serta PT SMI dan PT PII. Tujuan penyelenggaraan dari kegiatan ini adalah untuk menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi dan turut mendukung pembangunan nasional melalui instrumen-instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.



Kemenkeu Raih Stan Terbaik dalam Festival Antikorupsi 2015

11/12

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Acara puncak Festival Anti Korupsi 2015 digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan KPK, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Festival Anti Korupsi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar bergantian di berbagai daerah. Acara ini merupakan puncak dari peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2015 yang digelar pada Kamis-Jumat (10-11/12). Kementerian Keuangan meraih stan terbaik dalam festival antikorupsi ini.

Presiden Serahkan DIPA 2016

14/12

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 bagi Kementerian/Lembaga (K/L) pada Senin (14/12) di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh K/L Berprestasi yang telah memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan. Kesepuluh K/L berprestasi tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri.



Berembuk Bersama di Seminar Reformasi Fiskal

11/12

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Kementerian Keuangan bersama BAPPENAS, Bank Indonesia, Australian Aid, Asian Development Bank, dan World Bank menyelenggarakan International Forum Economic Development and Public Policy, di Grand Hyatt, Bali, Kamis-Jumat (10-11/12). Acara yang mengusung tema "Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth: Striking The Right Balance" ini merupakan kelanjutan dari seminar internasional dalam beberapa tahun terakhir, yang mengusung topik Indonesia Avoiding Middle Income Trap (2013) serta Growth Strategies for Rising Indonesia (2014).

Kilas Balik 2015



Pemerintah melakukan serangkaian upaya untuk menstabilkan perekonomian Indonesia di tengah tekanan ekonomi global. Sejumlah paket kebijakan perekonomian diluncurkan pemerintah dalam beberapa tahap, termasuk di dalamnya kebijakan perpajakan dan kebijakan dana desa. Hal ini demi menjaga APBN dan perekonomian tetap sehat, tumbuh dan bergerak sesuai dengan yang diharapkan.

Januari

(06/01)

Peluncuran **Program Transformasi** Kelembagaan berupa 6 inisiatif **Quickwins** Transformasi Kelembagaan meliputi pengembangan kapasitas Kring Pajak 500-200, kantor modern 2.0 DJBC, Modul Penerimaan Negara Generasi-2 (MPN G2) Ditjen Perbendaharaan, Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) DJA, Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SIMPel) dari LPSE Sekretariat Jenderal, dan e-Auction dari DJKN.

(09/01)

Penerbitan **Modul Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)** Tahun Anggaran 2015 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai acuan mempersiapkan data untuk pengalokasian DAK tahun-tahun berikutnya.

Februari

(13/02)

Pengesahan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015** menjadi Undang-Undang APBN Perubahan 2015.

(17/02)

Peluncuran dan Peresmian Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik atau Sistem Penerimaan Negara Generasi 2 (**MPN G2**) oleh Menteri Keuangan.

Maret

(03/03)

Penyelenggaraan Kick-Off **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual** sebagai langkah awal perubahan penerapan akuntansi pemerintah dari basis cash toward accrual menuju basis akrual penuh.

(19/03)

Uji coba lelang internet dengan **Aplikasi Lelang Internet (ALI)** secara serentak di seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

April

(29/04)

Peluncuran **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)** oleh Joko Widodo dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan negara guna mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual dan memfasilitasi pelaporan keuangan secara online dan realtime.

(29/04)

Pencanangan **Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015** sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Mei

(20/05)

Pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016 pada **Rapat Paripurna Pendahuluan RAPBN 2016** oleh Menteri Keuangan.

Juni

(04/06)

Penyampaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014** oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(17/06)

Peresmian **klinik Akuntansi Akrual** bertema "Klinik Akuntansi Akrual, Mitra Solusi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah" oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung target laporan keuangan pemerintah beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(29/06)

Penetapan **Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** bagi wajib pajak orang pribadi Sebesar Rp24,3 juta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Juli

(01/07)

Pelantikan **Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi**, oleh Menteri Keuangan untuk menggantikan posisi Dirjen sebelumnya Agung Kuswandono.

(22/07)

Kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam **Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2016**.

Agustus

(14/08)

Penerbitan PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang **Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak** Penghasilan Badan untuk sembilan sektor industri berupa pengurangan PPh badan terutang selama 5-15 tahun dengan besaran pengurangan pajak 10-100 persen.

(14/08)

Pemaparan **Nota Keuangan 2016** oleh Menteri Keuangan. Pemerintah mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa melebihi alokasi anggaran bagi belanja Kementerian/Lembaga serta anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

September

(09/09)

Pengumuman **Paket Kebijakan Tahap I** berfokus pada upaya mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha, serta mempercepat proyek strategis nasional dan meningkatkan investasi di sektor properti.

(14/09)

Penandatanganan **Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri** antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan **percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa**.

(30/09)

Pengumuman **Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II** berfokus pada peningkatan investasi berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan terkait investasi untuk menarik penanam modal dalam negeri maupun asing.

Oktober

(07/10)

Pengumuman **Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III** berupa penurunan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik untuk industri.

(15/10)

Pengumuman **Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV** berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian kredit permodalan bagi UMKM yang berorientasi atau terlibat dalam kegiatan mendukung ekspor.

(30/10)

Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang APBN (RAPBN) menjadi **APBN 2016** dengan target pendapatan Rp1.822,5 triliun dan target belanja Rp2.095,7 triliun.

November

(06/11)

Peluncuran **Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI**. Salah satu fokusnya adalah menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menggerakkan investasi dan perekonomian.

(25/11)

Pengesahan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016** oleh Presiden RI dengan sasaran utama pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan belanja produktif dan pertumbuhan daerah.

Desember

(04/12)

Peluncuran **paket kebijakan ekonomi tahap VII**. Salah satu fokusnya pada pemberian keringanan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi perusahaan padat karya.

(10/12)

Penyelenggaraan **International Forum Economic Development and Public Policy** bertema "Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth: Striking The Right Balance" oleh Kemenkeu, Bappenas, dan Bank Indonesia untuk kebijakan strategi APBN ke depan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJKN

BERBAGI PERAN MEMBANGUN NEGERI

Mari Jaga dan Kelola Aset Negara Tanpa Korupsi



www.djkn.kemenkeu.go.id



@Ditjen_KN



DitjenKekayaanNegara



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Call Center

1500-991

Kita Tidak Krisis

Pemberitaan media tentang kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2015 begitu berwarna. Secara umum, 2015 bukanlah tahun yang mudah. Kelesuan dan ketidakpastian ekonomi global masih mendominasi dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian tanah air. Sepanjang kuartal I-III, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4 persen. Angka ini relatif tidak tinggi, tapi sebenarnya tergolong baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Jangan sampai usaha untuk meningkatkan pajak justru menimbulkan ketakutan orang untuk berbisnis, berinvestasi, dan membayar pajak dengan benar.

Sri Adiningsih



Mata uang rupiah juga berfluktuasi sepanjang 2015. Sempat melemah pada beberapa pekan, kinerja rupiah juga tidak terlalu buruk jika dinilai selama satu tahun. Perlambatan ekonomi sempat dikhawatirkan membawa Indonesia kembali pada kondisi krisis tahun 1998. Namun, hal ini dibantah oleh Febrio Kacaribu, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Menurut Febrio, tidak adil membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan keadaan 17 tahun yang lalu. “Waktu itu, perekonomian kita masih sangat kecil, sehingga begitu ada gejala di pasar global, rupiah langsung anjlok. Sekarang jauh berbeda,” kata salah satu dosen pengajar FEB UI itu. Kondisi kelesuan ekonomi internasional selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan kondisi yang disebut *the new normal*. Situasi normal yang baru ini juga melingkupi nilai tukar rupiah. Pada semester pertama 2015, gejala rupiah dinilai lebih besar dibandingkan pada semester kedua. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil belakangan ini diharapkan dapat mendorong kinerja ekonomi.

Febrio juga menyoroti kinerja ekspor dan impor yang sempat turun bersamaan pada tahun ini. Dampaknya adalah pada jumlah cadangan devisa yang sempat menurun. Namun demikian, Febrio optimistis bahwa cadangan devisa akan lebih stabil jumlahnya pada 2016.

Kilas balik perekonomian 2015 juga tak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang dimulai pada September. Hingga saat ini, sudah

ada tujuh paket yang diluncurkan ke publik. Febrio menilai pemerintah tidak terlalu perlu untuk mengeluarkan paket-paket lain dalam waktu dekat. “Tidak usah terlalu pusing mencari paket yang lain lagi, yang sudah ada dijalankan saja dulu. Pasar dan pelaku bisnis akan melihat pemerintah memang serius,” kata Febrio.

Penyerapan anggaran dan pajak

Di tempat berbeda, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih sepakat bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam situasi krisis ekonomi. Sistem keuangan kita saat ini dibandingkan dengan tahun 1998 jauh lebih baik. “Industri perbankan cukup kuat dan sehat. Yang juga menarik adalah sistem keuangan non bank itu peranannya semakin meningkat,” ujar Sri.

Sistem keuangan non bank seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan yang berkembang sepanjang tahun ini dipandang positif. Industri perbankan masih dominan, tetapi peranannya semakin turun. “Itu bagus ya karena tidak bagus kalau suatu perekonomian hanya tergantung kepada bank,” kata Sri. Harapannya, perkembangan yang terjadi ini dapat terus berlanjut. Menurut Sri, kondisi industri bank dan non bank yang sehat dapat menjadi jangkar bagi stabilitas

sistem keuangan kita.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Sri juga memberikan dua catatan penting terkait kinerja ekonomi 2015, yaitu tentang penyerapan anggaran dan penerimaan pajak. Penyerapan anggaran menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perencanaannya yang masih belum komprehensif, lambat, dan adanya ketakutan pejabat untuk menjadi pimpinan proyek. Ekonom Universitas Gajah Mada itu berharap proses transisi pemerintahan di level nasional yang prosesnya berlangsung pada tahun ini dapat menjadi pelajaran. Apalagi, beberapa waktu lalu baru saja dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Sri berharap pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih, terutama jika ada pemimpin-pemimpin baru, bisa belajar dengan cepat.

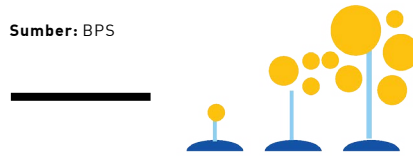
“Mudah-mudahan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada cukup kuat dan bisa mendampingi siapa pun yang terpilih menjadi gubernur, walikota, dan bupati,” kata Sri yang ditemui Media Keuangan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta Pusat, belum lama ini. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perlambatan di dalam implementasi kebijakan anggaran. Sri berharap SKPD di daerah membantu untuk mendorong rencana pembangunan jangka menengah setiap daerah agar dapat menerjemahkan visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang sekaligus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Terkait realisasi penerimaan pajak, Sri berpandangan bahwa tahun ini akan menjadi periode yang berat. “Realisasi pajak tampaknya akan kekurangan cukup banyak dari target, yang belum pernah terjadi sejak tahun 1970-an,” kata Sri. Prediksi ini menjadi tantangan sendiri, lanjut dia, bagi pemerintah. Meskipun memang harus diakui di Indonesia banyak orang yang belum membayar pajak secara benar.

Sri menilai perlu dibuat strategi-strategi untuk membenahi sektor perpajakan, terutama dalam

Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 dibandingkan triwulan III-2014 (yoy) tumbuh 4,73 persen dan dibandingkan triwulan II-2015 (qoq) tumbuh sebesar 3,21 persen.

Sumber: BPS



meningkatkan kepatuhan. “Jangan sampai usaha untuk meningkatkan pajak justru menimbulkan ketakutan orang untuk berbisnis, berinvestasi, dan membayar pajak dengan benar,” kata Sri. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dipandang perlu memikirkan pendekatan kekeluargaan yang lebih bisa diterima untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Misalnya, pendekatan dengan sudut pandang bahwa membangun bangsa memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. “Jadi bukan hanya menakut-nakuti, melainkan juga memberikan pengertian supaya masyarakat dengan suka rela ingin berbagi, mau membayar kewajibannya karena juga peduli kepada masa depan bangsa dan negaranya,” Sri melanjutkan.

Lebih jauh, pemerintah perlu bekerja keras untuk menunjukkan bahwa uang pajak yang dibayarkan masyarakat ada manfaatnya yang terlihat. “Selama ini kan sudah bayar pajak mahal, tapi keluhannya jalan masih buruk atau tidak ada pelabuhan, sehingga semuanya tidak tertata bagus dan mengakibatkan ketidakrelaan masyarakat membayar pajak,” ujar Sri. Pembenahan di sektor perpajakan akan membuat masyarakat lebih sadar dalam membayar pajak pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan sejumlah kebijakan transformasional di bidang ekonomi. Salah satunya adalah menjadikan 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Sri berharap inisiatif program itu dan kebijakan-kebijakan lain dapat mulai dilihat hasilnya tahun depan. Sri kembali mengingatkan bahwa pajak adalah alat, instrumen negara yang menjadi kewajiban warganya. Namun, kata Sri, hal itu bukanlah tujuan akhir. “Masyarakat sejahtera yang memiliki pekerjaan, penghasilan, dan jaminan sosial yang baik adalah tujuan akhirnya,” ujar Sri.

Yang penting daya saing

Tahun 2015 juga memberikan catatan pentingnya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Berdasarkan peringkat daya saing ekonomi Indonesia versi World Economic Forum (WEF), terjadi penurunan dari posisi 34 pada tahun lalu menjadi posisi 37 dari 140 negara. Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis WEF, daya saing Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di urutan 32. Indonesia unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar (131).

Sri berharap program-program Nawacita Presiden Jokowi akan mampu mengubah ekonomi kita termasuk meningkatkan daya saing. “Perlu waktu, hanya saja saya sampaikan bahwa program kebijakan proyek jangka menengah kita bagus,” kata Sri. Program-program peningkatan kualitas SDM, pembenahan sistem birokrasi dan prosedur perizinan, termasuk pembangunan berbagai sarana infrastruktur memang perlu waktu untuk dapat dinikmati hasilnya. Namun, dengan perencanaan program yang baik pada RPJMN, Sri yakin pemerintah akan mampu mentransformasi ekonomi kita menjadi ekonomi yang berdaya saing dan mandiri.

Teks Dwinanda Ardhi

Evaluasi di Berbagai Lini Ekonomi

Teks Dr. Muh. Amir Arham, Dosen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Negeri Gorontalo, Ekonom Regional Kementerian Keuangan



Gejala melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terasa di penghujung 2013, tetapi “*turbulence*” makin kuat pada 2015. Setidaknya ada empat risiko global yang patut dicermati bakal berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, harga komoditas global, misalnya karet, sawit, dan hasil tambang andalan Indonesia yang harganya *volatile* dan cenderung melemah. Kedua, kinerja perekonomian negara *emerging market* yang masih melambat, utamanya Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Brasil dan Rusia bahkan minus. Yang ketiga, kinerja ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat mendorong terjadinya arus balik dolar AS. Apalagi negara maju lain seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa diketahui juga berada dalam upaya pemulihan. Keempat, adanya ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, seperti normalisasi The Fed dan paket kebijakan Bank Of Japan dan European Central Bank. Kebijakan moneter mereka mendorong otoritas moneter dalam negeri untuk hati-hati melangkah dalam rangka mengendalikan depresiasi rupiah.

Meskipun terjadi tekanan risiko perekonomian global, apabila dibandingkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk masih yang terbaik dalam kelompok G20. Pertumbuhan juga cenderung stabil jika dibandingkan dengan negara *peers emerging market*. Lebih jauh lagi, Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi utama di Asia dan tingkat investasinya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Namun, harus diakui bahwa

perlambatan pertumbuhan ekonomi karena faktor eksternal (global) bukan penyebab tunggal. Faktor internal tak kalah pelik. Daya beli masyarakat yang cenderung menurun, kinerja ekspor yang melambat, serta belanja pemerintah yang realisasinya teramat lambat adalah faktor internal yang harus dicari solusinya. Sementara investasi, sekalipun meningkat, lebih banyak ke sektor finansial dan cenderung menciptakan *bubble economy*.

Dalam situasi dengan pilihan yang tidak banyak, stimulasi kebijakan untuk menggerakkan roda perekonomian sangat diperlukan. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus menemukan solusi komprehensif berdampak jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hingga saat ini, sudah ada tujuh paket kebijakan yang dirilis oleh pemerintah. Tujuh paket ini diharapkan dapat menjadi *way out* bagi kemajuan ekonomi kedepan.

Untuk kebijakan fiskal dalam jangka menengah, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan struktur anggaran dan pola belanja, baik di pusat maupun daerah. Namun, hal ini belum sepenuhnya dapat berjalan. Penyerapan anggaran, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masih tidak tepat waktu. Polanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menumpuk di akhir tahun. Di tengah situasi seperti ini, belanja pemerintah menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal ketiga, sudah dapat digambarkan secara empirik ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,73 persen. Sumber pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah sebesar 6,56 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Sementara kebijakan fiskal yang terkait dengan penerimaan negara melalui perbaikan sumber pendapatan yang berkelanjutan belum memberikan hasil yang optimal. Target pajak yang dapat ditolerir di atas 85 persen, per November 2015 realisasinya baru mencapai sekitar Rp. 828,93 triliun atau baru 64 persen dari total target. Jadi, *shortfall* (selisih antara target dan realisasi) sangat besar. Hal ini akan berdampak terhadap pembiayaan pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Realisasi penerimaan pajak yang rendah juga tidak dapat dipungkiri akibat masih minimnya kesadaran para Wajib Pajak (WP) untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Terlebih lagi, ada faktor terbatasnya pemahaman WP terkait ketentuan pajak. Kebijakan pendukung seperti *sunset policy* jilid dua yang pernah berhasil pada tahun 2008 nyatanya belum dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Mungkinkah *tax amnesty* bisa menjadi pilihan untuk mendorong penerimaan pajak di tahun 2016? Kebijakan ini bukan perkara gampang, karena sangat sensitif dan nuansa politiknya cukup kental. Sebagian besar WP yang memarkirkannya dananya di luar negeri erat kaitannya dengan rezim-rezim masa lampau yang mendapatkan dana dengan cara yang “tak halal”. Namun, upaya ini tidak salah dicoba, sekaligus dapat dijadikan ajang rekonsiliasi anak bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

APBN Kita: Kini dan Nanti

Layaknya sebuah rumah tangga, negara juga memiliki daftar pendapatan dan belanja yang perlu disusun guna memenuhi kebutuhan rutin, jangka pendek, dan jangka panjang. Sumber-sumber pendapatan harus dapat diketahui secara jelas, begitupun dengan alokasi pengeluarannya. Terlebih, jumlah anggaran negara begitu besar dan melibatkan banyak anggota bernama rakyat Indonesia. Di sinilah tantangan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Tahun 2015 adalah masa transisi di mana perencanaan anggaran yang disusun pemerintahan sebelumnya harus dijalankan oleh pemerintahan yang baru.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, APBN 2015 disusun dengan sifat *baseline budget*. Artinya, rencana pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Hal ini guna menyediakan ruang yang lebih luas bagi pemerintahan baru agar dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai.

Mengusung konsep Nawacita, pemerintahan baru Jokowi-JK bersama dengan kabinet kerjanya, mempercepat pengajuan APBN Perubahan Tahun 2015 di awal tahun. Semangat ini didorong untuk mengakomodasi program-

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro optimis dapat mengendalikan defisit. "Kami upayakan (realisasi) defisit di akhir tahun (2015) di seputaran 2,5 persen, tidak lebih," ungkap Menkeu dalam paparan APBN 2016 di Jakarta.

program inisiatif unggulan sebagai bentuk implementasi atas konsep tersebut. Di samping itu, terdapat sejumlah deviasi yang signifikan antara asumsi dasar makro pada APBN 2015 dibandingkan dengan *outlook* terkini akibat kondisi perekonomian dunia yang belum stabil. Hal ini berpengaruh pada perubahan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itulah, pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015.

Pada APBNP 2015, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,7 persen atau turun 1,0 persen dari APBN 2015. Sementara itu, inflasi diperkirakan lebih tinggi dari asumsi sebelumnya, mencapai 5,0 persen. Kenaikan juga terjadi pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya diperkirakan Rp11.900 per dolar AS menjadi Rp12.500 per dolar AS. Selanjutnya suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulanan direvisi turun dari 6,2 persen menjadi 6,0 persen. Harga minyak mentah Indonesia juga diasumsikan lebih rendah dari kisaran rata-rata US\$105 per barel menjadi sebesar 60 dolar AS per barel akibat turunnya harga minyak dunia yang diimbangi dengan kelebihan pasokan akibat pemanfaatan *shale oil* dan gas.

Terobosan Baru

Selain perubahan pada asumsi makro, APBNP 2015 memiliki sejumlah terobosan yang tidak terdapat pada APBN tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dengan penambahan dua indikator selain tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan, yaitu gini rasio dan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua indikator tersebut menjadi sinyal agar pemerintah juga fokus terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Pada sisi belanja negara, kebijakan paling esensial adalah pengalihan atas belanja kurang produktif ke belanja lebih produktif untuk mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Untuk itu, anggaran subsidi yang semula 20 persen dari total belanja negara ditekan menjadi 11 persen saja. Selanjutnya anggaran transfer ke daerah dan dana desa ditambah, sehingga porsinya menjadi 33 persen dari total belanja. Begitu pun belanja infrastruktur yang naik lebih dari 40 persen dibandingkan APBN 2014 atau sebesar 15 persen dari total belanja pada APBNP 2015.

Pemerintah selanjutnya memproyeksi pendapatan negara pada APBNP 2015 lebih rendah hingga 1,80 persen dari APBN 2015. Hal ini terutama akibat penurunan minyak dunia yang berdampak pada penurunan capaian PNBP. Untuk itu, pemerintah mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor nonmigas dan cukai. Meski demikian, pemerintah optimis penerimaan perpajakan dapat meningkat, sehingga capaiannya direvisi naik menjadi Rp1.489,3 triliun.

Dengan demikian secara umum komposisi APBNP 2015 yaitu



pendapatan negara sebesar Rp1.761,1 triliun, belanja negara sebesar Rp1.984,1 triliun, dan defisit negara sebesar Rp222,5 triliun atau 1,90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan perkiraan defisit dalam APBN 2015 yang mencapai 2,21 persen.

Realisasi Target 2015

Tak dapat dipungkiri, perekonomian Indonesia terdampak guncangan ekonomi dunia. Hal ini mengakibatkan sejumlah realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro meleset dari perkiraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II tumbuh 4,67 persen atau sedikit melambat dibandingkan triwulan I sebesar 4,72 persen. Sementara tingkat inflasi tertinggi mencapai 7,26 persen pada Juni dan Juli 2015, meski pada November 2015 turun menjadi 4,89 persen.

Pemerintah meluncurkan sejumlah upaya agar pendapatan negara dapat mencapai target, terutama terkait penerimaan perpajakan. Langkah perbaikan dilakukan pemerintah meliputi administrasi dan regulasi perpajakan, ekstensifikasi wajib pajak baru, hingga mengoptimalkan kapabeaan dan cukai. Hingga 30 Oktober 2015 penerimaan perpajakan terealisasi Rp894,0 triliun atau 60,0 persen dari target. Hal ini mempengaruhi capaian realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.099,8 triliun atau 62,4 persen dari target APBNP 2015. Sementara itu, capaian belanja negara terealisasi Rp1.383,8 triliun atau 69,7 persen dari target, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai 83,3 persen atau sebesar Rp553,9 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro optimis dapat mengendalikan defisit. "Kami upayakan (realisasi) defisit di akhir tahun (2015) di seputaran 2,5 persen, tidak lebih," ungkap Menkeu dalam paparan APBN 2016 di Jakarta.

Menatap 2016

APBN 2016 sudah mulai disusun



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

- Pertumbuhan Ekonomi (%)
- Inflasi (% , yoy)
- Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)
- Nilai Tukar (Rp/US\$)
- Harga Minyak (US\$/barel)
- Lifting Minyak (ribu barel/hari)
- Lifting Gas (MBOEPD)



dipatok sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB. Menurut Kunta Wibawa, Direktur Penyusunan APBN, melebarnya defisit anggaran dilakukan guna mempercepat pembangunan, meningkatkan belanja, dan mendorong daerah-daerah untuk tumbuh.

Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun atau sekitar 8,0 persen dari total belanja negara. Tak lupa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dipenuhi pemerintah dengan total Rp419,2 triliun, begitu pun anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN atau sebesar Rp104,8 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja transfer ke daerah dan dana desa hingga 115,9 persen dibandingkan APBNP 2015. Alokasi dana desa sendiri naik 6 persen sesuai dengan *road map* dana desa 2015-2019.

Adanya rencana percepatan pembangunan sejak awal tahun berimplikasi pada peningkatan dana belanja yang turut meningkatkan kebutuhan dana. Mengantisipasi hal ini, Direktur Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko, Scaider Siahaan, mengakui dibutuhkan sumber pembiayaan lain. “(Salah satu) Opsinya melalui penerbitan SBN pada kuartal IV tahun 2015. Namun, pelaksanaan *prefunding* akan dilakukan setelah aturan operasional dan penentuan besaran penerbitan SBN ditetapkan Menteri Keuangan,” jelasnya. Masih menurut Scneider, pemerintah juga mengambil kebijakan sumber pembiayaan dari luar negeri baik bilateral maupun multilateral.

Menanggapi postur APBN 2016, Candra Fajri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menilai sudah cukup baik. Menurutnya, stabilitas sosial politik dan kelancaran koordinasi antarinstansi pusat dan daerah turut mendorong perbaikan kinerja ekonomi. Termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang dinilai realistis, serta semangat Nawacita yang tampak nyata dari besaran transfer ke daerah dan dana desa.

Teks Farida Rosadi

Rp

APBNP 2015	APBN 2016
5,7	5,3
5,0	4,7
6,2	5,5
12.500	13.900
60	50
825	
1.221	1.155

Ilustrasi
Arfindo Briyan

pada awal tahun 2015 dengan mengusung tema ‘Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas’. Terdapat sedikitnya empat sektor prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mewujudkan arah kebijakan. Pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Kedua, dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan. Ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Terakhir, kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demonstrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Rapat paripurna selama lebih dari sepuluh jam pada Jumat (30/10) untuk mengesahkan APBNP 2016 membuka harapan baru. Asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen atau lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di sepanjang kuartal I-III tahun 2015. Selanjutnya asumsi ekonomi makro yang disepakati antara lain tingkat inflasi 4,7 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.900 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulanan 5,5 persen, dan harga minyak mentah Indonesia dengan rata-rata US\$50 per barel. Sementara lifting minyak diasumsikan 830 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1.551 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk pendapatan negara, pemerintah menyepakati sebesar Rp1.822,5 triliun dengan dominasi penerimaan pajak hingga Rp1.360,1 triliun. Selanjutnya belanja negara disepakati sebesar Rp2.095,7 triliun sehingga defisit anggaran

Telaah Kritis APBN 2015

Teks Moh. Ahlis
Djirimu, Staf Pengajar
Jurusan IESP Untad,
Ekonom Regional
Kemenkeu RI Wilayah
Sulawesi Tengah

RAPBN terkini disusun untuk menjawab tantangan ekonomi global melalui perubahan struktural yang harus dilaksanakan saat ini, jangka menengah, dan jangka panjang. Caranya dengan mengoptimalkan pendapatan negara yang mencakup *reinventing policy*, *e-faktur*, *compliance risk management*, pajak sumber daya alam, serta perbaikan administrasi dan revisi regulasi perpajakan. Tujuannya untuk mengalihkan sumber pendapatan dari komoditas khususnya migas, memperluas cakupan basis pendapatan, menaikkan tingkat kepatuhan pajak, menghindari kebocoran pajak terutama restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan memperkuat institusi pajak.

APBN 2015 disusun dengan skenario asumsi optimis, tetapi capaian realisasinya jauh dari perkiraan. Pada APBNP 2015, perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen hanya tercapai 4,7 persen pada semester I. Tingkat inflasi *year on year* yang diperkirakan 5,0 persen melesat hingga 7,26 persen pada Juli 2015. Perkiraan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.332 per dollar US meleset menjadi Rp13.481 per dollar US pada Juli 2015. Selanjutnya kurs berkisar Rp13.740 per dollar US, jauh melemah akibat ketidakpastian ekonomi global dan kerentanan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulanan yang diperkirakan sebesar 6,2 persen hanya dicapai 5,7 persen pada semester I dan 5,8 persen pada Juli 2015. Harga minyak mentah Indonesia dalam dollar per hari hanya mencapai US\$56 dari perkiraan capaian US\$60, sehingga mengurangi penerimaan sektor minyak bumi dan berdampak pada dana bagi hasil sumber daya

alam (SDA) di enam propinsi penghasil SDA tersebut. Capaian *lifting* minyak bumi per hari hanya 750,6 ribu barel dari perkiraan capaian 825 ribu barel. Akibatnya, impor minyak bumi meningkat dan berpotensi mengurangi cadangan devisa Indonesia. Selanjutnya, gas hasil Indonesia dalam barel setara minyak per hari hanya terealisasi 1.168 ribu pada Semester I 2015 dari perkiraan capaian 1.221 ribu.

Ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh 4,7 persen pada 2015 adalah laju terendah sejak 2009. Perlambatan ini seiring dengan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar US, bahkan sempat mencapai titik terendah sejak krisis Asia 1997. Akibatnya timbul kekhawatiran adanya *capital outflow* yang dapat berdampak krisis. Namun, kekhawatiran ini sangat berlebihan karena fenomena penguatan dolar US tidak hanya terhadap rupiah, tetapi juga terhadap hampir semua mata uang global. Pada Januari–Oktober 2015, terjadi *capital outflow* sebesar US\$1,3 miliar, tetapi transaksi pembelian bersih di pasar obligasi Negara mencapai US\$5 miliar. Artinya, *capital inflow* melebihi *capital outflow* dan investor menanamkan modalnya dalam jangka panjang.

Pada sisi lain, Pemerintah berhasil menurunkan rasio utang dari 100 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2000 menjadi 25 persen pada 2015. Defisit neraca berjalan sebesar 3 persen dapat dikurangi melalui investasi asing langsung (FDI) sebesar 2 persen dari PDB. Hingga September 2015, FDI telah mencapai US\$21,3 miliar dan pada akhir tahun diperkirakan mencapai US\$28 miliar. Tingginya FDI akan menjadi solusi tepat untuk mengurangi

defisit transaksi neraca berjalan karena bersifat jangka panjang. Tanpa sengaja, 40 persen FDI ditanamkan pada sektor jasa dan tersier, termasuk infrastruktur, bersamaan dengan alokasi dana infrastruktur sebesar Rp600 triliun dalam APBNP 2015. Pada sisi domestik, dominasi perputaran keuangan di sektor infrastruktur tidak menimbulkan dampak inflasi di dalam negeri.

Tantangan terbesar APBNP 2015 adalah masih rendahnya penyerapan anggaran K/L dan APBD, sehingga pembangunan infrastruktur terhambat dan menjadi salah satu faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperparah dengan penerimaan negara di sektor pajak yang belum mencapai target. Apabila hingga akhir 2015 Pemerintah dapat merealisasikan penyerapan anggaran 90–95 persen, termasuk realisasi barang modal, maka dampak langsung yang terjadi adalah adanya transformasi dari pertumbuhan alamiah di desa menjadi pertumbuhan langsung bahkan pertumbuhan berefek ganda (*multiplier effect of growth*). Selain itu terjadi dampak tak langsung pada sektor swasta, sehingga realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 kemungkinan akan lebih tinggi dari perkiraan.

Akhirnya, sejarah mencatat bahwa pada 2015 Pemerintah punya keberanian dalam hal revolusi anggaran, yaitu menghapus subsidi premium yang (sebesar) 74 persen salah sasaran. Selanjutnya pemerintah mengalokasikan dana tersebut dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan di desa yang diikuti oleh alokasi dana desa sekitar Rp20 triliun sebagai implementasi Nawacita ketiga pemerintahan Jokowi–JK.



Berlari Mengejar Target Pajak

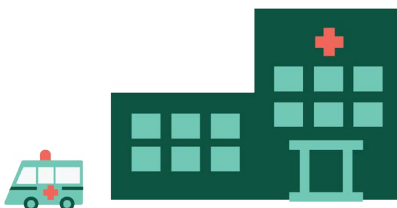


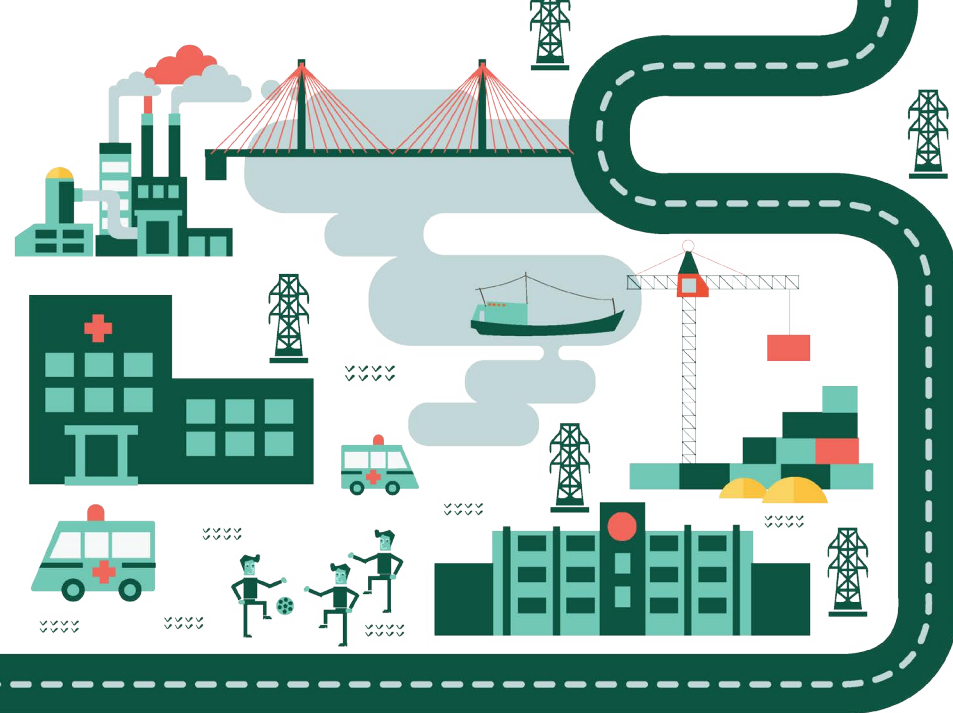
Bulan Maret 2015 lalu warga Aceh Utara bersuka cita. Presiden Joko Widodo resmi meletakkan batu pertama dalam pembangunan bendungan Keureuto. Bendungan terbesar di Sumatera ini akan meningkatkan hasil produksi pertanian dan perekonomian masyarakat Aceh. Pembangunan bendungan adalah salah satu contoh infrastruktur yang bersumber dari pajak. Andai masyarakat mengetahui betapa besar peranan pajak bagi pembangunan nasional, para Wajib Pajak tentunya akan berlomba-lomba menunaikan kewajibannya tanpa beban.

Lima poin yang harus lebih ditekankan dalam internal DJP, yakni penguatan teknologi informasi, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

Sigit Priadi Pramudito

Ilustrasi
Arfindo Briyan





Tahun 2015 merupakan momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengejar target penerimaan. DJP tidak berjalan sendirian, Presiden Joko Widodo turut menunjukkan keseriusannya. Akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menegaskan target pajak di tahun 2015. Sebuah langkah yang tak pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.

Demi mengejar penambahan target pajak sebanyak Rp 400 triliun, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berjanji untuk menjadikan pajak sebagai fokus kerja tahun ini. Berbagai gebrakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang secara resmi dilantik pada 6 Februari 2015. Sigit menuturkan kepada Media Keuangan bahwa peningkatan target pajak memerlukan usaha ekstra seluruh jajaran pegawai DJP.

Sigit yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar ini mengutarakan ada lima poin yang harus lebih ditekankan dalam internal DJP, yakni penguatan teknologi informasi, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran. Jika kelima poin itu bisa ditingkatkan, bisa dipastikan akan semakin melecutkan kinerja DJP demi menembus target penerimaan.

Gijzeling untuk menggenjot penerimaan

Pada awal tahun 2015, masyarakat sudah dikejutkan dengan gebrakan DJP dalam memburu pengemplant pajak. Berita mengenai beberapa penyanderaan dan paksa badan (*gijzeling*) cukup menyita perhatian seluruh kalangan. Pasalnya, baru kali ini DJP bekerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan sanksi pidana bagi penunggak pajak. Keberanian

DJP mengambil langkah ini tak lepas dari dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. Sebagai contoh, dua penunggak pajak di Palu Sulawesi Tengah langsung membayar lunas tunggakan pajaknya senilai Rp 3,2 miliar setelah empat hari disandera.

Gijzeling atau paksa badan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun sejak UU tersebut diberlakukan, *gijzeling* belum banyak dipraktikkan. Tentu saja, kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun langkah tegas Presiden Joko Widodo bersama DJP perlu diapresiasi. Negeri ini menuntut percepatan pembangunan. Tentu penerimaan negara dari sektor pajak sangat diperlukan. Pengemplant pajak kelas kakap, terutama yang tidak memiliki niat baik untuk melunasi, patut dipidana sampai melunasi hutang pajaknya.

Sigit menuturkan, penunggak pajak tidak serta merta dikenakan sanksi pidana, namun melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Pertama, wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya diberikan surat teguran. Kedua, Wajib Pajak bisa berkonsultasi untuk mencicil kewajibannya. Ketiga, bila tidak ada niat baik untuk melunasi maka aset-aset penunggak pajak tersebut akan disita. Bukan tidak mungkin pula rekeningnya akan dibekukan. Terakhir, setelah cara-cara tersebut dilakukan dan Wajib Pajak tersebut tak kunjung membayar, maka diberlakukan *gijzeling* sebagai langkah akhir. Tujuan *gijzeling* sebenarnya semata-mata agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mengingat pajak sangat diperlukan bagi percepatan pembangunan.

Target Penerimaan
Perpajakan Tahun
2015 dalam
APBNP 2015:

**Rp1489,3
triliun.**

**2 juta
Pengguna
e-filing**

ditargetkan di tahun
2015 atau meningkat
dari realisasi tahun
lalu sebesar 1,2 juta
pengguna.

**9,92 juta
WP Per-
orangan**

telah melaporkan
SPT pada tahun 2015;
meningkat 17,58
persen dibandingkan
dengan periode yang
sama tahun lalu.

Optimalisasi penerimaan pajak

Tahun 2015 adalah tahun penuh semangat bagi seluruh pegawai DJP. Remunerasi gaji pegawai dinaikkan demi memotivasi pegawai DJP untuk menggenjot penerimaan negara. Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.489



triliun dalam APBN-P 2015, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.143,3 triliun. Tentu DJP harus mencari cara efektif demi meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk mencapai target penerimaan.

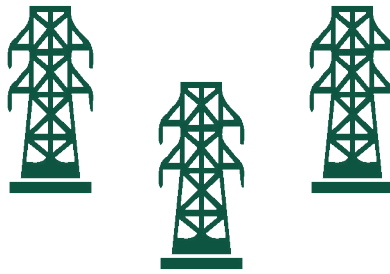
Presiden Joko Widodo melihat masih ada potensi pajak yang belum tergali sebanyak 1200 triliun. Hal itulah yang mendasari adanya peningkatan target penerimaan pajak di tahun 2015. Untuk itu, Sigit mengungkapkan perlunya independensi DJP secara organisasi yang memiliki kewenangan besar dalam mengelola pajak. Tidak serta merta DJP harus terpisah dari Kementerian Keuangan. Salah satu jalan keluarnya, DJP secara kelembagaan tetap berada di bawah Kementerian Keuangan, namun memiliki kewenangan yang diperluas dan diperbesar.

Selain itu, permasalahan sumber daya manusia juga menghambat kinerja DJP. Jumlah pegawai DJP sebanyak 32.000 orang dinilai kurang mencukupi untuk menangani 250 juta penduduk Indonesia. Ibaratnya, satu orang pegawai DJP harus mengurus 1000 penduduk. Penambahan pegawai ini juga perlu dibarengi dengan sistem teknologi dan informasi yang memadai serta memudahkan penarikan pajak.

DJP juga tak henti-hentinya terus berinovasi dalam bidang teknologi informasi perpajakan. Terkait hal ini, DJP mengembangkan dan menyempurnakan Aplikasi Profil Berbasis Web. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak. Semua sistem tersebut terintegrasi dengan kantor pelayanan pajak di daerah serta pusat.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Sayang rasanya bila masyarakat melewati tahun 2015 ini tanpa menunaikan kewajiban pajaknya. Pasalnya, DJP memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak khusus pada tahun 2015. Wajib Pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2014 dengan benar dan



lengkap memiliki kesempatan untuk terbebas dari sanksi. Syaratnya, Wajib Pajak harus melaporkan pembetulan SPT di tahun 2015, sekaligus melunasi pajak yang terutang sesuai laporan pembetulan tersebut.

Program yang dikenal dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini sedang digencarkan ke seluruh pelosok negeri. Pencanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilatarbelakangi adanya peluang peningkatan penerimaan pajak, rendahnya *tax ratio*, adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tersentuh, dan tersedianya data eksternal yang akan membantu DJP dalam mencapai target penerimaan.

Strategi yang digunakan oleh DJP meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi data pihak ketiga, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kementerian/Lembaga. Dengan memanfaatkan data pihak ketiga, diharapkan akan semakin banyak Wajib Pajak yang tersentuh.

Selama ini, SPT menjadi acuan DJP untuk melihat data penerimaan pajak. DJP memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2010-2014. Perbaikan yang dimaksud berupa kesalahan atau unsur kesengajaan saat memasukkan penerimaan yang diperoleh.

Bagaimana bila masyarakat belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? DJP juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Berbagai publikasi dan sosialisasi juga

telah dilakukan DJP agar program yang mengusung moto '*reach the unreachable, touch the untouchable*' ini berjalan sesuai target.

Barang Mewah Bebas Pajak dan Tax Amnesty

DJP menunjukkan keseriusannya dalam menggenjot penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang sukses menarik perhatian masyarakat adalah pembebasan pajak barang mewah. Terhitung 9 Juli 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan aturan penghapusan pajak sejumlah barang mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.10/2015.

Penghapusan pajak barang mewah ini memang akan menurunkan penerimaan dalam jangka pendek, namun *multiplier effect* yang diperoleh justru sebaliknya. Tingkat konsumsi masyarakat diharapkan meningkat di tengah perekonomian yang lesu. Pemerintah menepis adanya anggapan bahwa kebijakan ini hanya memihak masyarakat kalangan menengah atas. Justru dengan adanya penghapusan pajak barang mewah, industri dalam negeri akan terstimulus dan semakin bergerak.

Selain melakukan berbagai upaya di atas, DJP juga menargetkan penerimaan pajak dari strategi pengampunan pajak atau *tax amnesty* sebesar Rp 60 triliun. Saat ini, draft Rancangan Undang-Undang mengenai *tax amnesty* sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Penerapan kebijakan ini direncanakan pada awal tahun 2016.

Menjelang akhir tahun 2015, masyarakat menyoroti DJP dengan berita mundurnya Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak per 1 Desember 2015. Meskipun mengejutkan, DJP tetap optimis mengejar target penerimaan. Ken Dwiwijastuti telah ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak. DJP tak pernah menyerah untuk terus menggali potensi pajak demi kemandirian pembangunan nasional.

Teks Pradany Hayyu

Jadilah
KONTRIBUTOR
Majalah Media Keuangan

Ketentuan
selengkapnya
dapat dilihat di:

<http://goo.gl/4mRysn>

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KETENTUAN PENULISAN:

- Substansi tulisan tidak memiliki *tone* negatif dan memberikan dampak negatif bagi Kementerian Keuangan;
- Substansi tulisan tidak menyinggung SARA;
- Penulis memberikan kewenangan kepada Biro KLI untuk melakukan *editing* terhadap tulisannya sesuai dengan kaidah penulisan tanpa mengubah substansi;
- Tulisan menjadi sepenuhnya milik Biro KLI;
- Tulisan tersebut dikirim melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id;
- Bagi pegawai yang tulisannya dimuat di majalah Media Keuangan akan mendapat insentif sesuai Standar Biaya Umum sebesar Rp100.000,00 (belum dipotong pajak) per halaman. Jumlah halaman yang dimaksud adalah halaman setelah di-*layout*.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Redaksi Media Keuangan
Gedung Djuanda I Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710
T. 6330 (internal), 021 3849605 (eksternal)
F. 021 3500847

Juzhong Zhuang: Kebijakan Fiskal yang Berperan Vital

Foto
Arfindo Briyan

Pembangunan sektor pendidikan sangat penting dan menunjang pertumbuhan. Yang harus digarisbawahi adalah pembangunan kualitasnya.

Urgensi penyusunan kebijakan fiskal yang tepat menjadi salah satu fokus bahasan seminar International Forum on Economic Development and Public Policy dengan tema Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth: Striking the Right Balance di Bali, 10-11 Desember 2015. Seminar ini merupakan inisiatif bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Bank Indonesia, Australian Aid, Asian Development Bank, dan World Bank. Dalam sambutan acara yang dilaksanakan di Nusa Dua tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazarra, menyampaikan beberapa poin penting tentang perekonomian Indonesia saat ini.

Ada beberapa tantangan perekonomian yang dihadapi pemerintah. Pertama, perekonomian global yang belum stabil. Kinerja ekonomi Jepang dan Tiongkok sedang menurun. Pada saat yang sama, perekonomian Amerika Serikat dan Eropa belum bisa dikatakan sangat baik. “Untuk itu, sumber pertumbuhan Indonesia bukanlah dari sektor eksternal, tetapi dari Indonesia sendiri,” ujar Suahasil.

Pembangunan industri manufaktur juga masih menemui persoalan, padahal sektor ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kita melihat bahwa perekonomian modern didukung oleh sektor manufaktur,” kata Suahasil. Tantangan ketiga adalah belum tercapainya pertumbuhan inklusif, dimana pertumbuhan ekonomi seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Yang tidak kalah berat adalah tantangan dari sisi *supply* (*supply constraints*), seperti efisiensi ekonomi yang rendah, ketimpangan infrastruktur, dan sektor keuangan yang belum berkembang dengan baik.

Forum Bali minggu lalu menjadi ajang yang tepat untuk mendiskusikan tantangan-tantangan di atas. Ditemui di sela-sela penyelenggaraan seminar tersebut, Deputy Chief Economist Asian Development Bank, Juzhong Zhuang, menjelaskan pentingnya kebijakan fiskal yang tepat bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan bagaimana pemerintah negara-negara Asia dapat menyusun struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien. Berikut petikannya.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif masih menjadi tantangan berat pemerintah Indonesia. Apa esensi dari pertumbuhan yang inklusif itu?

Dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang penting adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai dan “investasi” pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain untuk dapat mendorong pembangunan SDM. Kebijakan fiskal berperan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan pemerataan akses bagi seluruh

masyarakat untuk mendapatkan peluang-peluang ekonomi.

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mencapai 5,3 persen. Apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut?

Caranya adalah dengan serius mengembangkan industri manufaktur. Pemerintah perlu membenahi industri ini dari hulu ke hilir. Tidak ada negara yang bisa maju saat ini tanpa mengembangkan industri manufaktur, kita bisa ambil contoh Korea Selatan dan Tiongkok.

Kalau sektor manufaktur bisa dikembangkan, ada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sampai tujuh persen. Namun, yang harus diwaspadai adalah potensi mengalami *middle income trap*. Negara-negara *developed countries* seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang butuh waktu lama untuk bisa terlepas dari *middle income trap*.

Selain sektor manufaktur, yang juga penting adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kita lihat di Indonesia sekarang, barang-barang impor banyak sekali, rata-rata berasal dari Tiongkok. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya sekali dibandingkan negara lain. Jadi sudah seharusnya bisa mengembangkan industri manufaktur. Caranya lewat pengembangan pendidikan secara serius. Kita lihat juga pada beberapa investasi asing yang sudah masuk, proses transfer *knowledge* terkadang belum dilaksanakan secara baik.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian

lebih pada anggaran infrastruktur. Bagaimana Anda melihat pilihan ini bagi ekonomi Indonesia?

Investasi di bidang infrastruktur tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di negara-negara Asia, anggaran infrastruktur masih relatif kecil. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa pengeluaran satu persen dari PDB pada sektor infrastruktur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,3 persen.

Pembangunan infrastruktur, bukan hanya di Indonesia, tapi di regional Asia, dapat mengurangi ketimpangan di kawasan. Belum lagi jika kita berbicara tentang efek pembangunan infrastruktur, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan bagi ekonomi. Untuk mewujudkan ekonomi Asia yang lebih berkembang dalam jangka waktu 2010-2020, diperlukan belanja sekitar 6 persen dari PDB per tahunnya. Saat ini, anggaran belanja infrastruktur di banyak negara Asia masih sekitar 2-3 persen saja.

Pembangunan sektor pendidikan sangat penting dan menunjang pertumbuhan. Yang harus digarisbawahi adalah pembangunan kualitasnya. Negara-negara di Asia juga perlu mengalokasikan anggaran lebih untuk bidang pendidikan dan kesehatan untuk menjawab isu ketimpangan ekonomi.

Bagaimana contoh kebijakan fiskal yang tepat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif?

Dengan memberikan alokasi yang cukup dari belanja negara untuk bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan dana transfer

yang efektif, maksudnya di sini adalah *targeted fiscal transfers*. Di samping itu, cara lainnya adalah mengumpulkan pendapatan negara dengan cara-cara yang lebih efektif, terutama dengan memperluas basis pajak. Pemerintah bisa saja memperkenalkan pajak progresif untuk sektor properti dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Bagaimana evaluasi terhadap perencanaan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah?

Pemerintah dapat melakukannya dengan membuat kerangka fiskal jangka menengah yang komprehensif. Setiap tahunnya, perlu dibuat kajian atas program-program ekonomi yang dijalankan dan menyesuaikan target jangka menengah dengan sarana pembiayaan yang ada untuk memastikan keberlanjutan fiskal. Di samping itu, pemerintah perlu mempunyai data fiskal yang benar-benar dapat diandalkan sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Indonesia telah mulai mengurangi kebijakan subsidi energi dan mengalihkannya untuk sektor lain yang lebih produktif. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Subsidi BBM lebih banyak memberikan manfaat bagi orang-orang kaya dibandingkan dengan rakyat miskin. Tentu saja hal ini harus dikurangi. Jika anggaran subsidi untuk BBM besar, secara otomatis akan mengurangi investasi pemerintah pada hal-hal lain, seperti sumber energi terbarukan dan yang lebih efisien.

Teks Irma Kesuma



Sri Adiningsih: Terus Jaga Kepercayaan Pasar

Tahun 2015 dapat disebut sebagai masa yang penuh ketidakpastian. Negara-negara berkembang harus menggunakan segala sumber daya mereka untuk mendukung program-program sosial yang menargetkan masyarakat miskin. Kesempatan untuk melakukan reformasi fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang penting dilakukan. Mengawali tahun 2016 Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden memberikan pandangannya kepada Media Keuangan.

Bagaimana Anda menilai kinerja ekonomi Indonesia 2015?

Tahun 2015 adalah masa transisi bagi pemerintahan. Pada nawa cita, pemerintahan baru berencana membangun dari pinggiran (pulau-pulau terpencil dan daerah tertinggal), terutama di Indonesia timur. Kondisi eksternal juga tidak terlalu bagus. Volatilitas ekonomi global makin tinggi. Belum lagi pengaruh ekonomi keuangan Tiongkok yang volatilitasnya juga besar, serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang menurun.

Di samping itu juga ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Jangan lupa kita juga mulai melakukan pengisian pejabat dengan lelang terbuka sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Semua hal ini terjadi secara bersamaan sehingga kita belum bisa maksimal. Namun paling tidak stabilitas ekonomi kita terjaga. Secara umum kita berhasil melalui masa-masa berat.

Seperti apa prediksi Anda akan kondisi global di 2016?

Kalau kita lihat laporan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik, dari 3,1 persen menjadi 3,6 persen. Pertumbuhan Indonesia sendiri dari 4,7 persen menjadi 5,1 persen. Pembangunan yang dilakukan dari tahun ini mestinya mulai kelihatan hasilnya tahun depan.

Meski begitu kita harus mulai mewaspadai *The Fed fund rate* yang akan naik secara bertahap. Kita punya banyak portofolio dan utang swasta jangka pendek. Oleh karena itu pengelola ekonomi kita harus menjaga kepercayaan. Kalau dunia usaha percaya ekonomi Indonesia akan dikelola lebih baik, uang-uang tersebut tidak akan keluar.

Foto
Dwinanda Ardhi

Berapa lama paket kebijakan ekonomi pemerintah akan efektif setelah diberlakukan?

Semua program, kebijakan, dan proyek jangka menengah pendek kita itu bagus. Dalam lima tahun akan mengarah pada peningkatan daya saing dan kemandirian. Memang hasilnya tidak bisa instan. Sementara saat ini ancaman pemutusan hubungan kerja itu nyata. Asean Economy Community juga mulai berlangsung awal 2016. Dampak perlambatan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran juga sudah nyata. Dengan demikian pada saat ini perlu ada kebijakan responsif dan antisipatif yang sifatnya jangka pendek. Maka muncul paket-paket tadi. Hasilnya juga perlu waktu karena

butuh kebijakan turunan, mulai dari Peraturan Menteri sampai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Namun paling tidak mulai ada kepercayaan bahwa pemerintah memang serius mendorong investasi dan dunia usaha.

Sektor apa yang akan menjadi prioritas pemerintah?

Pangan, energi, maritim, dan industri akan digarap secara konsisten. Pembangunan dam, irigasi, dan pasar-pasar tradisional di perdesaan saat ini *kan* untuk menggarap pangan.

Begitu juga asuransi petani dan desa berdaulat benih. Kita juga akan menjalankan program lumbung satu juta hektar yang kemarin diluncurkan di Merauke. Mudah-mudahan berhasil, karena tidak mudah mencetak sawah seluas itu. Kita berharap produksi padi di daerah timur Indonesia akan meningkat sehingga tidak lagi perlu diambil dari Jawa atau impor.

Apakah sistem keuangan kita sudah cukup mumpuni untuk menghadapi gejolak di depan?

Dibandingkan tahun 1997 sistem keuangan kita jauh lebih baik. Kondisi perbankan kita cukup kuat dan sehat. Peranan sistem keuangan non bank juga semakin meningkat. Mulai dari asuransi, pasar modal, hingga lembaga pembiayaan. Diharapkan perkembangan lembaga keuangan non bank ini berkelanjutan agar kita tidak tergantung pada bank.

Peranan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) menjadi sangat penting. Kalau volatilitas meningkat, kita *kan* perlu tindakan yang cepat. Saya berharap tidak akan pernah terjadi, tetapi lebih baik berjaga-jaga. Jika terjadi sesuatu kita sudah siap secara legal. Saya harapkan UU JPSK bisa segera diselesaikan di DPR supaya otoritas ekonomi punya secara legal basis untuk menjaga stabilitas keuangan.

Bagaimana menjaga kinerja sektor andalan untuk ekspor?

Dalam dua dekade terakhir, neraca perdagangan barang kita sering defisit, walaupun surplus (jumlahnya) kecil. Artinya kita semakin tidak bisa bersaing dan nilai tambah ekspor kita juga tidak tinggi. Kita masih banyak tergantung pada *resource based* yang belum diproses lebih lanjut. Contohnya, kita mengekspor rumput laut dalam bentuk kering. Harganya hanya Rp10.000 per kg. Padahal kalau diproses, misalnya menjadi nori, selain enak, harganya juga mahal.

Kita belum bisa membangun industri dari hulu ke hilir seperti negara tetangga khususnya Tiongkok. Industri kita ada yang bahan bakunya bahkan sampai 90 persen impor. Inilah mengapa program-program pemerintah mengarah ke sana. Misalnya menyediakan proyek listrik 35.000 Megawatt dan sarana transportasi di berbagai pulau. Penggarapan tol laut, rel kereta api, dan pelabuhan saat ini juga diharapkan bisa menurunkan biaya logistik. Misalnya dengan adanya kapal terjadwal rutin dari Belawan sampai ke Bitung, biayanya bisa turun sampai 40 persen. Infrastruktur yang terbangun lebih baik akan mendorong industri untuk mengolah sumber daya alam dengan lebih baik.

Apalagi stimulus yang perlu diberikan?

Membuka usaha di daerah baru tentu perlu insentif. Tentunya insentif tidak selalu dalam bentuk uang tetapi juga kemudahan-kemudahan. Selain ada infrastruktur, juga perlu dukungan Pemerintah Daerah untuk mempermudah perizinan dan dukungan keamanan. Dengan begitu hambatan investasi dapat diminimalkan.

Teks Irma Kesuma

Semua program, kebijakan, dan proyek jangka menengah pendek kita itu bagus. Dalam lima tahun akan mengarah pada peningkatan daya saing dan kemandirian.

Waktunya Memperkuat Sang Penyokong

Membangun Indonesia dari pinggiran. Gagasan itulah yang menjadi prioritas utama pemerintahan baru ke depan. Pembangunan yang semula terpusat di ibu kota, akan tersebar rata ke seluruh pelosok nusantara. Sasarannya, mempersempit kesenjangan dan ketimpangan demi kesejahteraan bangsa. Salah satu caranya dengan penyaluran dana desa.

Dalam dasawarsa terakhir, di kota-kota besar jamak terlihat gedung pencakar langit, jembatan, jalan raya, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan. Bisa dikatakan bahwa pembangunan Indonesia selama ini bias urban atau menitikberatkan pada kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Padahal sejatinya, di desa, kawasan pesisir, dan perbatasan negara merupakan penyokong kebutuhan masyarakat kota.

Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan dana desa serta mempersempit kesenjangan dan ketimpangan alokasi.

Menteri Keuangan,
Bambang P.S. Brodjonegoro



Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Penduduk desa tak menikmati kemudahan akses karena infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja jumlahnya terbatas sehingga pendapatan masyarakat desa lebih rendah. Belum lagi kurang meratanya kualitas pendidikan hingga rendahnya aktivitas keuangan daerah.

Data Badan Pusat Statistik mencatat gini rasio Indonesia sejak 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan dari 0,38 menjadi 0,41. Angka ini menunjukkan bahwa porsi terbesar kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir rakyatnya. Inilah yang mendasari pemerintahan baru menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Berperan

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memegang empat peranan. Pertama, mengalokasikan dana desa dalam APBN. Kedua, mengalokasikan dana desa ke setiap kabupaten atau kota. Ketiga, menyalurkan dana desa ke kabupaten atau kota. Terakhir, melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa.

Dalam APBN Perubahan 2015, tak kurang dari Rp20,7 triliun digelontorkan pada sekitar 74.093 desa yang tersebar dalam 434 kabupaten/kota. Nantinya dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sementara fokus pembangunan akan disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Terkait cara pengalokasian, pemerintah telah mengatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan bahwa perubahan PP tersebut memiliki dua misi utama. "Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan dana desa serta mempersempit kesenjangan dan ketimpangan alokasi," ujarnya saat sosialisasi dana desa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (15/5) silam.

Pada PP Nomor 22 tahun 2015, *road map* pemenuhan alokasi dana desa mencapai sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah. Dari perhitungan itu, maka diperkirakan alokasi dana desa secara nasional mencapai rata-rata Rp1 miliar per desa di tahun 2017 mendatang.

Selanjutnya, penyempurnaan formulasi pengalokasikan dana desa dilakukan melalui penerapan alokasi dasar dan perubahan formula. Alokasi dasar yang ditetapkan ialah sebesar 90 persen dari total pagu anggaran dana desa.

Sisanya, sebesar 10 persen dari pagu anggaran dana desa akan dialokasikan berdasarkan formula. Formula tersebut dihitung berdasarkan basis jumlah penduduk sebesar 25 persen, luas wilayah sebesar 10 persen, angka kemiskinan sebesar 35

persen dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30 persen.

Setelah itu, alokasi dana desa akan disalurkan dari Rekening Kas Umum negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tiga tahap. Tahap pertama, 40 persen dana tersalurkan paling lambat pada minggu kedua April dengan syarat Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian dana desa.

Tahap kedua, 40 persen dana disalurkan paling lambat pada minggu kedua Agustus. Tahap ketiga, dana tersalur sebesar 20 persen paling lambat minggu kedua November. Adapun syarat kedua tahap tersebut yakni Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada Semester I pada tahun berjalan.

Setelah dana desa masuk ke RKUD Kabupaten/Kota, Kepala Desa yang telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengalokasikan dana desa di dalamnya berhak menerima dana desa. Selambatnya tujuh hari kerja, dana tersebut telah dikirim oleh Pemda kabupaten/kota ke Rekening Kas Desa (RKD). Setelah dana diterima, barulah Kepala Desa dapat menjalankan program pembangunan desa.

Pasca dilaksanakannya program pembangunan desa, Kepala Desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota. Lalu, Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada sejumlah Kementerian teknis.

Pada tahap ini, Kementerian Keuangan berperan atas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Bila ternyata pemerintah kabupaten/kota terbukti melakukan pelanggaran dalam mengelola dana desa, maka mereka akan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pemotongan dana desa.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh

Roadmap Pengalokasian Dana Desa (DALAM MILIAR RUPIAH)

2015
20.766,2

2016
47.684,7

2017
81.184,3

2018
103.791,1

2019
111.840,2



**Rata-rata
Alokasi Dana
Desa per Desa**
(DALAM JUTA RUPIAH)

2015
280,3

2016
643,6

2017
1.095,7

2018
1.400,8

2019
1.509,5

Ilustrasi
Dewi Rusmayanti

Widodo, pemerintah Pusat sudah menyalurkan 80 persen pagu dana desa yaitu sebesar Rp16,6 triliun secara tepat waktu, kepada kabupaten dan kota. “Masing-masing untuk penyaluran tahap I dan tahap II ialah Rp8,3 triliun,” tuturnya seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin (16/11).

Namun hingga 13 November 2015, dana desa yang sudah disalurkan dari RKUD ke RKD baru mencapai Rp6,2 triliun. Bahkan, dari 434 kabupaten/kota, baru 244 yang melaporkan penyaluran dari RKUD ke RKD. Sementara sisanya belum menyampaikan laporan.

Sebelumnya, pada penyaluran tahap pertama, dari 244 daerah sebanyak 136 daerah telah menyalurkan seluruh dana desa ke desa sebesar Rp2,89 triliun atau 34,7 persen. Sedangkan 84 daerah baru menyalurkan dana desa sebesar Rp1,16 triliun atau 14 persen. Sisanya sebanyak 24 daerah belum menyalurkan sama sekali.

Penyebabnya yakni keterlambatan penyampaian peraturan bupati (perbup) dan peraturan walikota (perwali) tentang pembagian dana desa. Keterlambatan ini ternyata disebabkan sebagian daerah baru memproses penetapan perbup/perwali setelah Peraturan Pemerintah (PP) No.22/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.93/2015 baru disahkan pada bulan Mei 2015.

Pada penyaluran tahap kedua, 129 daerah sudah menyampaikan laporan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 59 daerah telah menyalurkan seluruh dana desa dengan jumlah Rp1,23 triliun atau 14,9 persen. Sementara 66 daerah baru menyalurkan sebagian dana desa kepada desa sebesar Rp968

miliar atau 11,7 persen. Sisanya, empat daerah belum menyalurkan sama sekali.

Untuk penyaluran tahap tiga, terjadi penundaan penyaluran dana desa karena ada sejumlah daerah yang terlambat atau belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, kata Boediarso, salah satu arah kebijakan dana desa tahun depan yakni menerapkan *reward and punishment* dalam menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota/desa.

Tantangan

Dalam penyaluran dana desa, Boediarso mengatakan bahwa pemerintah setidaknya menemui lima persoalan mendasar yang menjadi tantangan di lapangan. Pertama, adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antar (peraturan) satu sama lain. Kedua, Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan terkait dana dan keuangan desa sebagai dasar penyaluran dana desa dari rekening daerah.

Ketiga, masih ada keterlambatan penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa. “Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan tepat waktu sebesar Rp16,6 triliun dana desa atau 80 persen dari pagu sebesar Rp20,7 triliun kepada Kabupaten atau Kota,” ujarnya.

Selanjutnya, Kabupaten dan Kota terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Terakhir, belum terpenuhinya ketentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dari APBD Kabupaten/Kota.

“Data APBD 2015 dan info dari daerah, tahun 2015 masih ada sejumlah daerah yang belum memenuhi ADD 10 persen dan PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 10 persen. Kalau ada yang belum dipenuhi, maka bisa jadi RAPBD kabupaten/kota tidak disahkan,” katanya.

Teks lin Kurniati

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dari Desa

Dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi 'angin segar' bagi masyarakat desa untuk menggiatkan pembangunan desa agar ketimpangannya dengan kota menjadi lebih sempit. Komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran diaktualisasikan dengan mengalokasikan dana desa dalam APBNP-2015 sebesar Rp20,7 triliun untuk dibagikan kepada 74.093 desa. Jumlah dana desa yang diterima kabupaten/kota bervariasi, dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong, dan lain-lain; ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat.

Berkaitan dengan belanja desa, dalam Pasal 74 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada

kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian belanja desa dapat membiayai kegiatan-kegiatan sepanjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah dana desa yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara rata-rata satu desa pada tahun 2015 memperoleh dana desa sebesar Rp300 juta.

Tahun 2016, dana desa akan meningkat menjadi Rp700 juta perdesa. Ditambah dengan ADD, pemerintah desa akan memperoleh pendapatan hingga Rp1 miliar hingga Rp1,2 miliar. Jika pemanfaatan dana sebesar ini tidak optimal, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa sangat mungkin tidak terwujud. Apalagi jika sumber dana yang besar tersebut diselewengkan.

Untuk mencairkan dana desa, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, daerah (kabupaten/kota) harus mampu memenuhi 2 (dua) syarat yaitu: (1) Pemerintah kabupaten/kota telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD kabupaten/kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur yang di dalamnya memuat pos anggaran dana desa yang berasal dari APBN; (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kedua, setelah dana desa masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), dana desa akan dapat dicairkan ke Rekening Kas Desa (RKD) jika desa telah menyiapkan peraturan desa tentang APBDes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa).

Mekanisme pencairan yang cukup banyak dan panjang, mengakibatkan tidak semua desa dapat



mencairkan dana desanya tahun ini. Penyaluran dana desa menjadi terkendala di sejumlah daerah, akibat pemda terlambat membuat perda yang disyaratkan.

Selain itu, dana desa yang telah tersimpan di kas daerah terkendala pencairannya ke rekening desa akibat penyediaan dokumen pendukung oleh pemerintah desa. Ketidaksiapan dalam penyiapan dokumen ini bersumber dari ketidakmampuan aparat desa untuk menyusun dokumen yang disyaratkan.

Kekhawatiran ini sepertinya terjadi. Hingga Oktober 2015, Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja.

Kalaupun dana desa telah cair ke RKD, masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa.

Untuk menghadapi mentalitas koruptif aparat desa, perlu diberikan sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparat desa dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa secara sistemik.

Untuk menjamin transparansi penggunaan dana desa, pemerintah dapat melakukan sejumlah strategi. Pertama, memberdayakan kembali tenaga pendamping yang pernah mendukung program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM). Tenaga pendamping PNPM terbukti berhasil dalam mengawasi penggunaan dana pembangunan perdesaan, dengan menekan kebocoran dana hingga 0,1 persen.

Berdasarkan catatan Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI), PNPM telah memberi manfaat bagi 13,3 juta Rumah Tangga Miskin (RTM), menyerap 11 juta tenaga kerja, dengan tingkat partisipasi masyarakat desa mencapai 60 persen dan 48 persen diantaranya perempuan. PNPM juga telah meningkatkan modal sosial berupa gotong-royong dan swadaya masyarakat, serta mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat.

Kedua, program pembangunan desa yang diajukan merupakan hasil musyawarah desa yang kemudian wajib diumumkan secara transparan menggunakan papan pengumuman yang diletakkan di depan kantor kepala desa.

Dengan begitu, masyarakat terlibat secara langsung mengawasi penggunaan dana desa. Sebagai indikator keberhasilan, aparat desa juga harus mengumumkan capaian perubahan kesejahteraan rakyat desa setelah dilaksanakannya program-program yang menggunakan dana desa.

Sebagai penutup, dengan anggaran desa yang terus meningkat, pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakatnya. Cita-cita tersebut akan lebih cepat terwujud, jika didukung oleh integritas, kreasi dan inovasi aparat desa dalam menjalankan 'roda' pemerintahan desa. Dengan demikian, dana desa akan cepat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Bayar Pajak Lebih Mudah Menggunakan **MINI ATM**



Masa Ujicoba Mini ATM sementara hanya untuk nasabah :



Masa Ujicoba Mini ATM sementara hanya untuk KPP Berikut :

KPP Pratama Jakarta Senen | KPP Pratama Jakarta Cengkareng | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu | KPP Pratama Jakarta Jatinegara | KPP Pratama Jakarta Pluit | KPP Pratama Yogyakarta | KPP Pratama Sleman | KPP Pratama Surabaya Wonocolo | KPP Pratama Surabaya Tegalsari | KPP Pratama Surabaya Genteng | KPP Pratama Surabaya Gubeng | KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | KPP Pratama Kepanjen | KPP Pratama Denpasar Timur | KPP Pratama Badung Selatan

Paket Stimulus Gairahkan Ekonomi



Sepanjang 2015 pemerintah telah mengeluarkan tujuh rangkaian paket kebijakan ekonomi. Keseriusan pemerintah ini dilakukan untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang berimbas pada perlambatan ekonomi dalam negeri. Diharapkan, seluruh paket kebijakan yang telah dan akan diluncurkan dapat menciptakan kondisi ekonomi makro yang sehat, menggerakkan ekonomi perdesaan dan nasional, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Membuka tahun baru ini, mari kita lihat kembali rangkumannya.



Air merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia serta merupakan unsur strategis dalam pembangunan nasional. Negara harus hadir dalam pengelolaannya.

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian,
Darmin Nasution



Paket pertama: Insentif Bagi Semua

Paket yang dikeluarkan pada awal September ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil. Secara tidak langsung, paket ini dimaksudkan untuk menjawab lambatnya pertumbuhan ekonomi pada awal hingga pertengahan tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan ke-II hanya 4,67 persen, lebih lambat daripada periode sama tahun lalu yang merupakan 5,12 persen. Laju ini juga merupakan tingkat terendah dalam enam tahun belakangan ini.

Sasaran utama paket pertama ini adalah meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak. Paket ini diperkirakan akan efektif dalam jangka menengah dan panjang.

Paket kedua: Upaya Mendorong Investasi

Konsep paket ekonomi kedua masih mengarah pada pertumbuhan investasi dan ekspor. Bentuk upaya ini berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, paket ini juga terkait dengan sektor keuangan, yakni pemberian insentif pajak bunga bagi eksportir yang menyimpan Devisa Hasil

Ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri untuk waktu lama.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbanyak persediaan valuta asing di pasar keuangan domestik. "Kami harapkan para eksportir kita terutama yang basisnya sumber daya alam benar-benar mau menaruh DHE-nya di dalam sistem perbankan Indonesia dengan fasilitas yang menarik," ujar Menkeu.

Paket ketiga: Menekan Biaya

Instrumen dalam paket kebijakan ekonomi jilid III memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menekan biaya melalui penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan gas untuk industri. Stimulus jangka pendek ini diambil agar beban perusahaan lebih ringan dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

Selain itu pemerintah juga melakukan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen. Tujuannya agar akses wirausahawan kepada kredit perbankan meningkat. Di bidang pertanahan, pemerintah merevisi Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Dengan begitu, diharapkan proses mengurus izin pertanahan menjadi lebih efisien.

Paket keempat: Perbaiki Sistem Pengupahan

Paket yang diluncurkan pertengahan Oktober 2015 ini berfokus pada sektor ketenagakerjaan dan penyaluran KUR. Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam keterangan persnya di kantor Presiden Jakarta Kamis (15/10) menjelaskan hal ini merupakan bentuk pemberian jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum yang terukur. Pasalnya, jika upah buruh meningkat, maka produktivitas perusahaan pun akan terkerek naik. "Kita juga harus memikirkan orang yang kerja. Jadi peningkatan kesejahteraan merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini," katanya.

Aturan ini juga memberi kepastian kepada pengusaha dalam berusaha. Rachmat Gobel, pengusaha nasional yang juga merupakan mantan Menteri Perdagangan menyambut baik regulasi ini. Menurutnya, aturan pengupahan yang baru ini merupakan unsur penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. "Negara harus selalu hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan peraturan yang kondusif," tegasnya.

Paket kelima: Insentif Perpajakan

Dalam paket ini, pemerintah memberikan insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan. Menkeu mengatakan revaluasi yang dimaksud adalah penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini. Menurut Menkeu, lazimnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan revaluasi aset dipatok 10 persen, namun periode tertentu tarif tersebut dipangkas. Pajak ganda untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE), properti, dan infrastruktur juga dihapuskan. "Pajak berganda akan dihilangkan jadi *single tax*. Jadi



diharapkan, instrumen kontrak investasi kolektif DIRE bisa muncul di pasar modal Indonesia dan bisa menarik investasi yang selama ini dilakukan di luar negeri,” katanya.

Di samping itu, pemerintah juga menyederhanakan peraturan perbankan syariah, baik dari sisi produk maupun pembukaan jaringan kantor. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyatakan kantor perbankan konvensional juga bisa digunakan oleh perbankan syariah. “Ini bisa mendorong efisiensi sehingga suku bunga bisa lebih murah,” terang Muliaman.

Paket keenam: Mengembangkan Kawasan Industri

Sasaran pertama paket ini adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran. Pengembangan KEK juga diharapkan dapat memberi kepastian dan daya tarik kepada para pemodal sehingga menciptakan lapangan kerja dan memberi penghasilan bagi pekerja di wilayah masing-masing.

Poin kedua, pemerintah memperketat aturan bisnis berbasis sumber daya air. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mencabut Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2010. “Air merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia serta merupakan unsur strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Negara harus hadir dalam pengelolaannya,” ujar Darmin.

Poin ketiga adalah penyederhanaan perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khususnya untuk impor obat atau bahan baku obat, serta makanan. Pengurusan perizinan impor obat menjadi lebih sederhana karena dilakukan 100% *online* dan tanpa kertas. Diperkirakan prosesnya hanya akan memakan waktu satu jam.

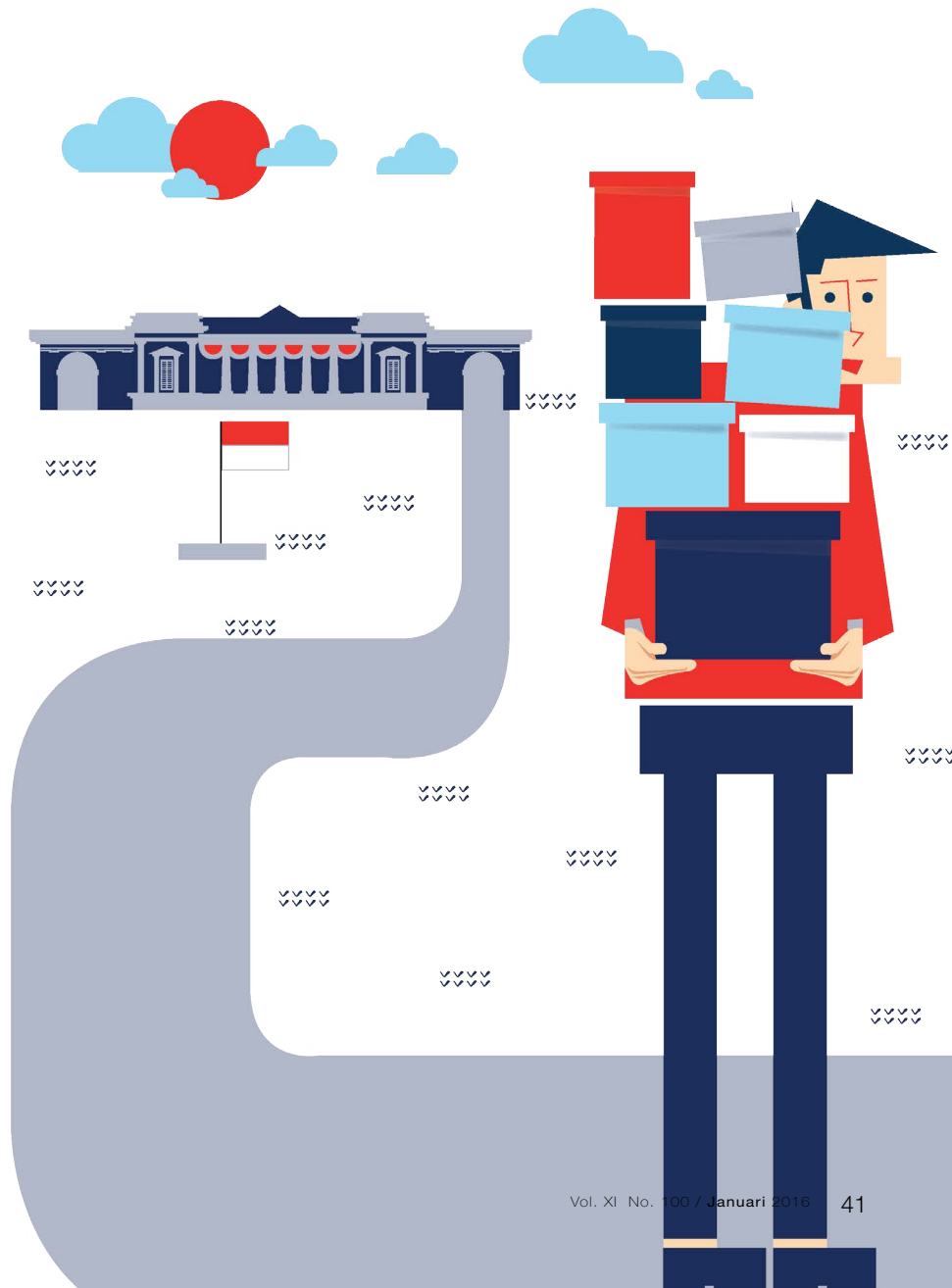
Paket ketujuh: Dorong Sektor Padat Karya

Instrumen dalam paket ini memberi kemudahan izin investasi, keringanan

pajak penghasilan untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan dunia usaha kerap mengkhawatirkan daya saing dengan negara lain, terutama akibat biaya produksi yang lebih tinggi. “Paket kebijakan ini diharapkan berdampak positif tidak hanya bagi investor *existing* yang mengalami masalah, namun juga menarik minat investasi baru maupun perluasan di sektor padat karya tersebut,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (5/12).

Sementara, Menkeu menjelaskan insentif penurunan tarif pajak penghasilan atas gaji, tunjangan, upah, dan hasil pekerjaan lainnya, secara tidak langsung bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Ilustrasi
Arfindo Briyan



Paket Lanjutan

Masih ada lagi jurus-jurus lain yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI memandang Kementerian Keuangan memiliki peran besar pada pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Salah satunya melalui penetapan atau perubahan regulasi. “Kementerian Keuangan harus mengawal atau setidaknya memantau pelaksanaan revisi atas 44 aturan terkait *dwelling time* yang terdiri atas 30 aturan di Kementerian Perdagangan, 12 aturan di Kementerian Perindustrian, dan 2 aturan di Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Taufik.

Anggito Abimanyu, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia mengingatkan, pelaksanaan rangkaian paket ini akan tergantung pada penyelesaian regulasi serta respon birokrasi yang menyiapkannya. “Ekspektasi pasar dan pelaku ekonomi sangat tinggi pada ketepatan waktu berbagai kebijakan. Bila tidak sesuai dengan harapan, kredibilitas pemerintah akan dipertaruhkan, ujaranya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, pemerintah masih akan menambah dosis kebijakan bila dirasa perlu. Semua aspek yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi akan diperkuat. Mulai dari iklim investasi, belanja pemerintah, konsumsi, hingga kinerja neraca perdagangan.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan namun masih lebih tinggi dibanding kebanyakan negara di dunia. Kondisi yang relatif baik tersebut ternyata tidak tergambar pada kinerja Rupiah dan pasar modal. Rupiah mengalami tekanan yang kuat hingga terdepresiasi hingga sempat berada di atas Rp14.000. Demikian juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lebih dari 15 persen. Situasi ini mendorong pemerintah menerbitkan 7 Paket Kebijakan Ekonomi.

Pada dasarnya, penerbitan paket kebijakan pada kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan merupakan suatu kebutuhan. Keseluruhan paket itu dapat memberi sinyal bagi dunia usaha tentang langkah pemerintah ke depan untuk mengatasi masalah yang ada. Namun demikian, pembuatan paket kebijakan perlu mempertimbangkan akar masalah yang ada sehingga konten kebijakan tidak berlebihan (*over shooting*) yang pada gilirannya mengorbankan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara luas.

Dari 7 paket kebijakan yang telah diterbitkan, beberapa hal perlu menjadi perhatian. *Pertama*, pemangkasan atas peraturan-peraturan dalam jumlah signifikan memang sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Namun demikian, pasal-pasal dalam peraturan yang tersisa perlu dikaji lebih lanjut agar tidak saling tabrak antar peraturan. Bila ini tidak diperhatikan akan membuat deregulasi menjadi tidak

Paket Kebijakan Ekonomi dan Masa Depan Indonesia

Teks Agus Tony
Poputra, Ekonom
Universitas Sam
Ratulangi

berguna.

Kedua, pengurangan waktu pengurusan izin yang cukup berarti, merupakan tindakan strategis sebab hal tersebut menjadi salah satu penghambat utama investasi selama ini. Akan tetapi pada tataran implementasi membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Sepanjang perizinan hanya menyangkut satu tingkatan pemerintahan, maka pembenahan kualitas termasuk perilaku sumber daya manusia, pemberian penghargaan dan hukuman, serta pemberian wewenang pada pejabat di *one stop service* menjadi *critical success factors*. Namun bila pengurusan izin melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan, maka persoalannya menjadi lebih kompleks terkait koordinasi dan perbedaan kepentingan. Perlu adanya aturan yang mendorong koordinasi antar lintas tingkatan pemerintahan.

Ketiga, pemberian insentif pajak perlu dilakukan dengan hati-hati. Insentif pajak akan menimbulkan pengurangan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pengorbanan tersebut harus dikompensasi oleh manfaat yang lebih besar bagi bangsa ini. Salah satu kompensasi penting dalam pemberian insentif adalah penciptaan lapangan kerja yang signifikan bagi rakyat Indonesia. Dengan bertambahnya penduduk yang bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menaikkan penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila insentif pajak diberikan pada investasi yang kurang menciptakan lapangan kerja, maka akan memperbesar kesenjangan pajak. Untuk menutup kesenjangan tersebut, maka usaha menengah domestik akan menjadi korban. Mereka akan menjadi sasaran pihak pajak dan menanggung beban pajak berlebihan.

Hal ini tentu mengganggu rasa keadilan. Apalagi bila insentif pajak diterima oleh perusahaan-perusahaan asing dan pajaknya ditanggung perusahaan domestik. Oleh sebab itu, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja domestik harus menjadi persyaratan utama pemberian insentif pajak.

Keempat, kebijakan mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi, bunganya dapat menjadi persoalan besar bagi sektor perbankan di masa mendatang bila tidak dilakukan secara komprehensif. Pemberian KUR dalam jumlah yang besar tanpa di ikuti oleh bantuan pencarian pasar serta pembenahan manajemen dan produksi UMKM, rentan menimbulkan kredit macet yang besar sebagaimana terjadi dengan Kredit Usaha Tani pada era Orde Baru. Kredit macet akan mengancam likuiditas bank penyalur KUR dan masalah likuiditas mereka akan semakin besar jika pemerintah tidak tepat waktu dalam membayar subsidi bunga.

Kelima, pemberian izin bagi asing untuk memiliki properti di Indonesia dapat menimbulkan persoalan

kedaulatan wilayah negara di masa mendatang. Sepanjang kepemilikan asing hanya pada properti yang berkonsep *strata-title*, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun bila termasuk pemilikan atas tanah terutama di daerah perbatasan, maka berpotensi menimbulkan masalah kedaulatan wilayah di masa mendatang dan dapat lebih parah dibanding Sipadan-Ligitan.

Pada dasarnya tujuh kebijakan yang telah dibuat dapat mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, paket-paket kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan wilayah di masa akan datang bila tidak diterapkan dengan hati-hati dan menyangkut pihak asing. Walaupun dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah, namun bila dalam penerapannya menimbulkan *mudharat* lebih besar dari manfaat, maka revisi harus dilakukan.

Ke depan, seharusnya paket kebijakan yang bersifat jangka panjang perlu dibuat pada kondisi normal agar dapat mempertimbangkan banyak aspek. Bila dibuat dalam keadaan krisis maka pertimbangannya sangat terbatas sehingga dapat merugikan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Selain itu, kebiasaan membuat paket kebijakan berlebihan di saat krisis tersebut akan menjadi sinyal bagi asing ataupun pihak tertentu untuk memainkan ekonomi Indonesia bila ingin mendapat kebijakan yang menguntungkan mereka.

100 Edisi Untuk Ekonomi Negeri

Majalah Media Keuangan pada edisi Januari 2016 ini mencapai angka ke-100. Kurang lebih selama 10 tahun sudah majalah resmi Kementerian Keuangan yang terbit bulanan ini menemani para pembaca dengan menyuguhkan karya jurnalistiknya. Sejak awal terbit, berbagai liputan kebijakan fiskal dan ekonomi terkini disajikan.

Semangat redaksi untuk mempublikasikan kebijakan fiskal dan ekonomi terkini pada dasarnya selaras dengan semangat mewujudkan transparansi kebijakan fiskal kepada publik. Hingga saat ini beberapa isu ekonomi selalu dikupas setiap tahunnya. Diantaranya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga *outlook* ekonomi.

Variasi Laporan Utama juga tetap dijaga oleh majalah Media Keuangan dengan mengikuti isu ekonomi yang menjadi perbincangan media komersil. Dengan kekuatan narasumber internal yang terpercaya, majalah Media Keuangan mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai isu ekonomi yang simpang siur serta menjawab dengan benar.

Misalnya edisi dengan Laporan Utama mengenai “Kesempatan Mempercepat Pembangunan”, “Paket Solusi Penggerak Ekonomi”, “Barang Mewah Bebas Pajak”, dan “Saatnya Desa Berdaya”. Beberapa isu ekonomi yang ditampilkan tersebut disambut hangat oleh publik. Itu sebabnya tema ekonomi tidak hanya diterapkan pada rubrik Laporan Utama, tapi juga terlihat di beberapa rubrik lain.

Lihat saja edisi yang terbit setiap tahun sudah memuat rubrik regulasi, ekonomi terkini, lintas peristiwa, reportase, dan kolom ekonom. Rubrik regulasi mengulas mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang disajikan dalam bentuk artikel. Ekonomi terkini membahas informasi seputar kebijakan fiskal terkini. Untuk memuat pandangan para ekonom Indonesia terhadap kondisi fiskal dan perekonomian terkini, kami menampung dalam rubrik kolom ekonom. Nafas ekonomi sangat terasa dalam setiap terbitan majalah Media Keuangan.

Itulah sebabnya *tagline* “Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal” akan terus dipertahankan karena memang itulah yang selama ini dijadikan unggulan sekaligus membedakan majalah Media Keuangan dengan media lain.

Tidak mau menjadi majalah yang monoton, media Keuangan juga sesekali membuat edisi khusus. Edisi khusus yang menjadi unggulan kami dan disambut dengan baik oleh banyak kalangan adalah edisi khusus perbatasan “Mengawal Fiskal di Tapal Batas” dan edisi khusus mantan Menteri Djuanda “Satu Nama Seribu Jasa”. Kedua edisi khusus ini dibuat dengan hati oleh para reporter, penulis, fotografer, dan tim desain.

Pada edisi khusus perbatasan, kami pergi ke perbatasan negara walaupun keadaan jalan, transportasi, maupun penginapan tidak cukup memadai. Untuk edisi khusus mantan Menteri Djuanda juga kami melibatkan beberapa sejarawan, mengulik dokumen di perpustakaan nasional dan arsip nasional. Kami juga melibatkan keluarga Djuanda yang tersisa, yang dalam pencariannya juga tidak mudah.

Di sisi lain, tampilan majalah Media Keuangan juga terus ditingkatkan. Berawal dari hanya berupa beberapa lembar koran dengan sebutan tabloid, lalu berkembang menjadi bentuk majalah. Diawali oleh majalah dengan jumlah halaman sebanyak 36 menjadi 58 halaman dengan mempertahankan halaman *full color*. Logo kami juga bertransformasi mengikuti perkembangan visi, misi, serta penyesuaian kebutuhan desain. Sementara itu, infografis juga menjadi andalan karena pembaca menjadi lebih mudah memahami persoalan ekonomi yang rumit melalui bantuan visual berupa gambar, angka, serta teks yang sederhana. Ini semua demi kepuasan pembaca, tentunya.

Kini majalah Media Keuangan genap menginjak edisi ke-100, 10 tahun sudah mengulas kebijakan fiskal dan ekonomi terkini. Tidak akan berhenti semangat kami untuk menyajikan liputan utama kebijakan fiskal dan ekonomi terkini dalam karya jurnalistik untuk negeri.

Teks Dianita Suliastuti

Pemimpin Umum,
Pemimpin Redaksi dan tim inti Media Keuangan.

Foto
Tino Adi Prabowo



Media Keuangan di Mata Mereka



Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan

Membuka tahun 2016, Media Keuangan genap mencapai edisi ke-100. Majalah ini lahir dari sebuah cita-cita, menyampaikan informasi kebijakan fiskal secara transparan. Edisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Media Keuangan untuk mengungkapkan rasa terima kasih bagi seluruh pembaca. Hingga seterusnya, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas tulisan dan memberikan kontribusi nyata bagi para pembaca. Seperti apa masukan dari mereka? Berikut beberapa di antaranya.

“Media berperan penting dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Media Keuangan harus mengoptimalkan peran ini dengan memberikan informasi pengelolaan keuangan negara yang benar, utuh, transparan, dan dapat diandalkan. Informasi yang berkualitas tersebut diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional.

Dengan harapan yang sedemikian tinggi, Media Keuangan harus amanah. Oleh sebab itu alangkah baiknya bila majalah ini juga menangkap pandangan dan harapan *stakeholders* terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Media Keuangan bisa menjembatani Kementerian Keuangan dan masyarakat sehingga memiliki perspektif yang sama mengenai apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah.

Edisi ke-100 menjadi titik pencapaian yang penting untuk membuktikan hal tersebut. Semoga Media Keuangan semakin baik dan semakin dinanti, dengan muatan informasi yang semakin ideal bagi masyarakat.”

*Hadiyanto,
Sekretaris Jenderal:*

“Sejak awal diterbitkan, Media Keuangan sudah banyak berkembang. Tak hanya menyampaikan informasi ekonomi keuangan secara transparan, Media Keuangan juga membangkitkan optimisme melalui konten yang inspiratif dan menghibur. Dengan oplah 5880 eksemplar, saya gembira majalah ini sudah menjangkau kantor wilayah Kementerian Keuangan serta seluruh *stakeholders* di 34 provinsi.

Foto
Dok. Biro KLI,
Dok. Pribadi

Usman Kansong, Pemimpin Redaksi Media Indonesia

“Sebagai praktisi media, saya lihat konten Media Keuangan sudah menggambarkan visi dan misi Kementerian Keuangan. Ragam artikel yang disajikan juga cukup menarik. Apalagi ada rubrik khusus yang menceritakan pengalaman penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sangat inspiratif. Meski LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan, namun jangkauan rubrik ini bisa luas sekali ketika orang membaca mengenai putra putri Indonesia yang hebat-hebat ini.

Dari sisi desain, khususnya cover, majalah Media Keuangan cukup elegan. Sementara untuk desain isi majalah, akan lebih menarik jika di setiap halaman ditambah foto atau ilustrasi agar tidak penuh oleh teks.



Selanjutnya saya usulkan agar penempatan artikel lebih variatif. Misalnya, laporan utama bisa saja diletakkan di halaman belakang, tidak harus di depan. Selain itu, pergantian atau perluasan artikel bisa sesekali dilakukan agar tidak membosankan.”



Kehadiran Media Keuangan dalam bentuk e-magazine juga memudahkan pembaca untuk mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa untuk terus berinovasi agar terus tumbuh di era multimedia dan multiplatform ke depan. Selamat mencapai edisi ke-100. Semoga semakin banyak membawa aspirasi kepada masyarakat.

*Saya berharap
Media Keuangan
hidup hingga
1.000 edisi lagi.”*



*Ismeth Wibowo,
Cucu dari Djuanda Kartawidjaja,
Menteri Keuangan (1959-1960)*

“Saya pertama kali membaca Media Keuangan pada edisi khusus bulan Oktober 2015. Edisi ini terbilang bermakna khusus. Selain bertepatan dengan peringatan Hari Oeang ke-69, Media Keuangan edisi tersebut secara spesial mengulas sosok Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang kebetulan adalah kakek saya.

Saya berharap media keuangan dapat menjadi referensi berharga, khususnya bagi peminat masalah keuangan dan praktisi dunia usaha. Seiring dengan kerja keras kita, marilah kita memohon semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya atas setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta ini.”

Mahasiswa Indonesia di Markas Energi Dunia

Foto
Bagus Wijaya



Jarum jam masih bertengger di angka tujuh ketika Media Keuangan bertemu dengan Almag Fira Pradana pada sebuah pagi belum lama ini. "Saya sempatkan bertemu klien dulu sebelum ke sini tadi," kata pria yang akrab disapa Almo itu memulai perbincangan di kantor McKinsey and Company, Jakarta. Di lembaga internasional kenamaan tersebut, Almo menjajaki karier sebagai konsultan energi. Usianya masih terbilang muda, tapi rekam jejaknya di bidang energi sudah di level dunia.

Kesempatan melanjutkan studi di Inggris dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) seolah menambah daftar pengalaman Almo "berpetualang" di negeri orang. Saat mendaftar program beasiswa LPDP tahun 2013, Almo sedang bekerja di Perusahaan Minyak Malaysia, Petronas. "Saya harus terbang bolak-balik Kuala Lumpur dan Jakarta selama proses seleksi," ujar Almo. Usahanya berbuah manis. Almo menjadi salah satu anak bangsa pada kloter pertama yang diberangkatkan LPDP untuk belajar di luar negeri.

Kampus yang menjadi pilihan Almo adalah University College London (UCL) di London. Di sana, dia mengambil jurusan Economics, Policy of Energy, and the Environment. Program S2 yang ditempuh pria kelahiran Dili, 20 September 1985 tersebut masih terkait dengan gelar yang dimilikinya sebagai Sarjana Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti. Almo lulus dari universitas itu dalam waktu 3,5 tahun dan setelahnya langsung diterima bekerja di Petronas. Selama tujuh tahun bergabung di perusahaan plat merah Negeri Jiran, Almo sempat berpindah tugas ke Mesir, Mauritania, Perancis, dan Vietnam.

Jurusan yang diambil Almo di UCL membuka horizon berpikirnya bahwa persoalan energi bukan hanya menyangkut urusan produksi, melainkan juga penyusunan kebijakan, faktor ekonomi, dan keberlanjutannya. “Ini adalah area di mana Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lain. Kita perlu mengejar ketertinggalan dengan cepat,” kata Almo. Menurut dia, Indonesia perlu lebih menggali pendekatan holistik dalam mengelola sektor energi. “Tidak hanya menjalankan peran sebagai produsen minyak dan gas saja,” lanjutnya.

Antara London dan Paris

Sebagai bagian dari proses kuliah master, Almo mendapatkan kesempatan magang di International Energy Agency (IEA) di Perancis. IEA adalah institusi super bergengsi, khususnya bagi mahasiswa jurusan Energi. Di antara teman-teman sekelasnya, hanya Almo yang lolos seleksi magang ke sana. Yang lebih mengagumkan, dia menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang mempunyai pengalaman berkantor di markas energy dunia itu.

Di Paris, Almo berkesempatan belajar membuat alternatif kebijakan energi dan mempresentasikannya langsung di hadapan para pejabat dari berbagai negara. “Saya jadi tahu bagaimana para pembuat kebijakan sangat ingin mendengarkan alternatif solusi dalam pengelolaan energi yang tepat dari *credible sources*,” ujar Almo. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika dia terlibat dalam *workshop* IEA yang mengundang hampir seluruh menteri energi dari negara-negara di Afrika.

Menjalani kuliah sekaligus magang di dua negara berbeda selama hampir satu tahun membuat Almo nyaris tak punya waktu luang. Dalam satu bulan, dua minggu digunakannya untuk berkuliah dan dua minggu yang lain untuk bekerja. Beristirahat di akhir pekan bahkan menjadi kemewahan tersendiri. Sebagai contoh, jika pada minggu pertama di bulan November Almo harus berada di Paris, maka pada hari Sabtu atau Minggu di akhir Oktober, dia mesti menempuh perjalanan dari London ke Paris dengan menggunakan bus umum. “Berangkatnya tengah malam dan sampai di Paris pagi sekali. Kalau saya berangkat minggu malam dari London, setibanya di Paris pada Senin pagi harus langsung ke kantor,” ujar Almo.

Sementara jika ada waktu berakhir pekan di Paris, Almo memanfaatkannya untuk bertemu dengan dosen dan teman-teman. “Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk

belajar bersama mereka, belajar sendiri di perpustakaan, dan sisanya mengerjakan tugas,” kata Almo. Yang menyenangkan, para pengajar di kampus sangat mendukung aktivitas Almo. Terkadang, mereka bahkan memberikannya opsi untuk dapat mengerjakan tugas melalui fasilitas *conference* jika sedang berada di Paris.

Gara-gara mati lampu

Almo mengaku telah menemukan *passion* hidupnya di bidang energi. Dengan pengalaman bekerja dan latar belakang pendidikan yang memadai, Almo bisa menjadi ahli energi andalan di masa depan. Namun, sebelum mantap dengan pilihannya, ternyata Almo sempat bimbang. “Sebelum akhirnya mengambil jurusan Teknik Perminyakan, saya sempat tidak tahu mau belajar apa,” katanya. Saat melihat karier beberapa om dan tantenya di industri migas, Almo jadi tertarik. “Terlihat keren dan banyak *traveling*,” ujar Almo lagi.

Alasan kedua adalah pengalamannya sebagai warga Surabaya yang sering mengalami mati lampu. Sebelum kuliah di Jakarta, dia memang tumbuh besar di sana. “Sampai saat itu saya ingat pernah mengatakan, ‘Boleh tidak saya dibelikan ensiklopedia?’ kepada ibu,” ujar Almo seraya tergelak. Dari ensiklopedia itu, dia berharap mendapatkan jawaban mengapa listrik di Kota Pahlawan sering padam.

Rencana karier

Saat ini Almo mengaku sedang sangat menikmati pekerjaannya. Sebagai konsultan, dia banyak membantu klien dalam memecahkan tantangan bisnis yang kompleks di sektor energi. Ini menjadi kesempatan sempurna bagi Almo untuk menerapkan apa yang telah dipelajari selama menempuh studi di luar negeri. “Saya menjadi semakin percaya bahwa kemitraan swasta-publik adalah kunci dalam mengambil kesempatan pembangunan Indonesia ke tingkat berikutnya, terutama di sektor energi,” kata Almo.

Klien yang bekerja sama dengan Almo bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di kawasan Asia Tenggara. Dia banyak memberikan alternatif kebijakan pengelolaan energi yang sesuai untuk para pengambil keputusan di negara-negara tetangga. Meskipun kaya pengalaman melanglang buana ke berbagai negara, untuk saat ini Almo senang menjalani pekerjaannya di tanah air. Mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Indonesia mendorong tekadnya untuk memberikan kontribusi balik. Di masa depan, Almo memiliki keinginan untuk bisa menjadi bagian dalam pembuat kebijakan pengelolaan energi di negeri ini.



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

Harga Jual Menjadi Acuan PPnBM Rumah Mewah

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, Menteri Keuangan kembali mengubah ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap properti untuk golongan tarif 20 persen. Batas pengenaan PPnBM ditetapkan Pemerintah sebesar 20 persen pada hunian rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya berdasarkan nilai harga jual. Besarannya masing-masing Rp20 miliar untuk jenis *nonstrata* (tanpa tipe) *title* dan Rp10 miliar untuk jenis *strata tittle*. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas PMK No.106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sebelumnya, PPnBM atas properti tersebut dikenakan berdasarkan luas bangunan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam PMK Nomor 106 yang terbit 9 Juni 2015

lalu, PPnBM dengan tarif 20 persen dikenakan atas rumah mewah, dan *town house* dari jenis *nonstrata title* dengan luas bangunan minimal 350 meter persegi atau lebih. Tarif yang sama juga dikenakan atas apartemen, kondominium, dan *town house* berstatus *strata title* dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih.

Tidak Diubah, Aturan Tetap

PMK Nomor 206/PMK.010/2015 hanya mengubah Lampiran I yang menguraikan jenis barang mewah non-kendaraan yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 20 persen. Aturan yang diundangkan tanggal 20 November 2015 tersebut berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau berlaku sejak 4 Desember 2015.

Selain Lampiran I, aturan terhadap PPnBM barang mewah lainnya masih mengikuti aturan lama. Pertama, pengenaan tarif PPnBM sebesar 40 persen untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, dan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Tarif ini juga dikenakan pada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, serta peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

Kedua, tarif PPnBM sebesar

50 persen tetap dikenakan untuk helikopter dan pesawat udara lainnya kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Tarif ini juga dikenakan untuk senjata artileri, revolver dan pistol, serta senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak, kecuali untuk keperluan negara. Ketiga, tarif tertinggi sebesar 75 persen juga masih berlaku untuk kapal pesiar, *yacht*, ekskursi, feri dan sejenisnya yang dirancang untuk pengangkutan orang, kecuali untuk angkutan umum dan kepentingan negara.

Penutup

Dalam rangka menggairahkan penjualan properti untuk rumah tapak dan apartemen, acuan ambang batas pengenaan tarif PPnBM telah diubah. Perubahan tersebut tidak lagi merujuk pada luas bangunan, tetapi pada nilai harga jual. Penilaian kriteria mewah berdasarkan nilai harga jual kiranya lebih tepat. Banyak rumah atau apartemen yang tidak terlalu luas tetapi terletak di daerah yang strategis sehingga otomatis harganya lebih mahal dibandingkan dengan hunian yang terletak di lokasi yang kurang strategis meskipun lebih luas.

Perubahan tarif PPnBM telah

Ilustrasi
Arfindo Briyan

ditunggu pasar properti kelas atas terkait batasan harga jual yang dikenakan PPnBM. Aturan yang berlaku sebelumnya menjadi kompromi antar pengusaha dan Pemerintah, karena adanya kekhawatiran di tengah lesunya pasar properti. Selama ini pengembang tidak berani membangun properti karena dengan pengenaan tarif PPnBM berdasarkan luas bangunan, harga properti menjadi terlalu mahal dan tidak laku.

Terbitnya PMK Nomor 206/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif PPnBM sebesar 20 persen terhadap nilai harga jual kelompok hunian mewah sebesar Rp 20 miliar untuk jenis nonstrata (tanpa tipe) title dan Rp10 miliar untuk jenis strata tittle telah menjawab kekhawatiran pasar. Kebijakan perubahan aturan tarif PPnBM merupakan bentuk pemberian insentif pajak bagi sektor properti yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang dikeluarkan pemerintah pada September 2015. Dengan kepastian hukum berupa perubahan batasan pengenaan PPnBM properti, pasar properti diharapkan dapat bangkit kembali, khususnya untuk segmentasi kelas atas.

Pasca ditetapkan aturan pengenaan PPnBM properti berdasarkan harga jual, tugas selanjutnya bagi Ditjen Pajak ialah memastikan kebenaran dokumen akta jual beli sebagai dasar perhitungan PPnBM. Ditjen pajak bekerjasama dengan instansi berwenang harus memperkuat pengawasan dokumen akta jual beli agar sesuai dengan harga jual yang sebenarnya.

Hal ini penting ditegaskan karena disinyalir masih banyak dokumen jual beli yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak, bukan harga jual beli. Selain itu, kerja sama Ditjen Pajak dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional juga perlu ditingkatkan untuk mengawasi transaksi jual beli properti khususnya hunian mewah agar penghindaran pajak (*tax evasion*) dapat diminimalisir. Pada ujungnya, penegakan peraturan akan mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak khususnya PPnBM.

Teks Budi Sulistyó

Cerita di Meja Makan



Ilustrasi
pixabay.com

Makan, pada saat ini, bukan hanya persoalan mengubah lapar jadi kenyang. Silaturahmi keluarga, kumpul teman sekolah, negosiasi bisnis, hingga pertemuan pejabat negara selalu difasilitasi dengan jamuan makan. Makan bersama ibarat strategi menghangatkan suasana, sehingga siapapun yang terlibat menjadi lebih santai dan terbuka untuk saling bertukar cerita dan pemahaman.

Saat saya kecil, ada juga kebiasaan makan bersama yang tak bisa saya lupakan. Setiap malam setelah makan, kami sekeluarga terbiasa duduk lebih lama di depan meja makan. Sambil menunggu makanan turun dari kerongkongan, atau sambil menunggu

Ibu mengupas buah, kami bercerita tentang banyak hal. Kebersamaan yang sekilas sederhana, namun-baru saya sadari-menjadi strategi Bapak untuk mendidik anak-anaknya.

Bapak sering bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, atau tentang usaha gigihnya menyelesaikan kuliah sambil berdagang minuman dingin. Terkadang, Bapak hanya melempar cerita santai dan jenaka. Lain waktu, Bapak juga mengeksplorasi minat kami atau cara mencapai cita-cita. Sesekali kami juga terlibat dalam kontemplasi, perdebatan akan nilai baik dan buruk dalam cerita. Dan ajaibnya, banyak dari cerita tersebut yang masih saya ingat hingga saat ini.

Cerita memang bisa dimaknai

banyak hal. Cerita bisa menjadi tuturan yang membentangkan banyak nilai dan pelajaran. Nilai dalam sebuah cerita akan menetap dalam sistem kecerdasan-khususnya anak, yang berguna dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya. Bahkan, penelitian membuktikan bahwa anak yang sering dididik melalui cerita memiliki perbendaharaan kata yang lebih kaya (Whitehurst et al, 1998), kemampuan narasi dan ingatan yang lebih baik (Reese & Newcombe, 2007) dan kecerdasan emosi yang lebih mendalam (Van Bergen et al, 2009).

Sebagai orang tua, kini saya berkaca pada diri sendiri. Rasanya jarang saya melakukan momen sederhana namun sarat makna seperti yang Bapak saya hadirkan dulu. Seringkali sulit untuk makan bersama karena pekerjaan kantor yang membuat pulang larut, atau karena agenda makan malam sudah dihapus dari jadwal rutin. Terkadang juga sulit untuk terlibat dalam cerita bersama, karena tempat makan kini telah bergeser ke depan televisi, atau bunyi notifikasi grup *whatsapp* yang lebih menyita perhatian pada saat makan.

Mengutip iklan sebuah produk teh, tampaknya momen kebersamaan keluarga tak boleh lagi dilewatkan. Bersama, tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga secara jiwa. Bukan mewah tidaknya makanan, tapi hangat atau tidaknya percakapan. Entah melalui secangkir teh atau makan malam, cerita di antara anggota keluarga harus terus mengalir, mendekatkan dan mengajarkan.

Teks Resirasari Diah

Blusukan di Negeri Kincir Angin



Judul:
Negeri Van Oranje
Penerbit:
Bentang Pustaka
Kota Terbit:
Bandung
Tahun Terbit:
Cetakan 6, 2015
Deskripsi Fisik:
576 halaman
ISBN:
97860229100367

Setiap manusia tidak pernah tahu takdir yang membawa mereka ke tempat yang baru. Kemudahan di tengah kesulitan terkadang hadir tanpa disangka. Banjar, Wicak, Daus, Geri dan Lintang adalah lima mahasiswa Indonesia yang ditakdirkan bertemu saat cuaca dingin menghampiri Amersfoort. Latar belakang mereka untuk bersekolah di negeri Belanda penuh dengan kontroversi. Banjar adalah seorang lulusan institut teknik ternama di Bandung yang meninggalkan kemapanan hidup sosialita Jakarta. Wicak merupakan sang aktivis *Illegal logging* karena penelitiannya 'diekstradisi' ke kantor pusat di Belanda. Daus adalah seorang pegawai negeri sipil golongan III/a Kementerian Agama yang memilih sekolah ke Belanda mengambil program Human Rights Law. Lintang, dengan bekal polis asuransi atas namanya, bertekad mengambil program di bidang European Studies. Kemudian, Geri adalah seorang anak juragan bus antar kota dengan saldo tabungan Eurnya

menyaingi pemenang "Who Wants to be a Millionaire" yang menetap di Belanda sejak kuliah Strata 1.

Alur cerita dalam buku ini sangat sederhana dan mudah ditebak. Penulis lebih menitikberatkan *setting* tempat dari setiap adegan dalam cerita. Merangkum kemegahan dan keindahan di setiap sudut kota Belanda menjadi ciri khas yang wajib dimiliki oleh setiap penulis. Raden Wahyuningrat, Adept Widiarsa, Annisa Rijadi, dan Rizki Pandu Permana, yang merupakan penulis buku ini, berhasil menggambarkan apa yang ada di bayangan pembaca tentang negeri Belanda. Pembaca akan terkesima dengan kehidupan mahasiswa di negeri kincir angin tersebut. Novel ini ditulis dengan alur cerita yang mengalir apik dan bahasa yang ringan. Pembaca juga akan dibuat tergelak beberapa kali dengan bumbu humor yang disisipkan penulis. Penyelipan bahasa Belanda dalam setiap percakapan para tokohnya menjadi nilai tambah sekaligus pengetahuan dalam buku ini. Kehadiran *footnote* dirasa bermanfaat dengan tips dan trik menarik dalam kemasan yang sederhana.

Membaca buku ini juga seperti sedang bernostalgia di era *chatting*, *Voice Over Internet Protocol (VOIP)*, dan blog yang digunakan oleh sesama mahasiswa Indonesia untuk saling berkomunikasi lewat internet di era tahun 2000-an. Biasanya mahasiswa Indonesia akan takjub dengan kecepatan akses internet di Belanda. Saat komputer baru saja dinyalakan dan tersambung dengan internet, mereka tidak perlu menunggu lama untuk mengunggah dokumen atau berkomunikasi seharian penuh.

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat

Perpustakaan
Kemenkeu

Perpustakaan
Kementerian
Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Andy Noya:
Kisah Hidupku
Andy Noya &
Robert Adhi SKP
- 2 Negeri Van Oranje
Wahyuningrat,
Adept Widiarsa,
Annisa Rijadi, Rizki
Pandu Permana
- 3 Sabtu Bersama
Bapak
Adhitya Mulya
- 4 Entrok:
Sebuah Novel
Okky Madasari
- 5 Maya: Misteri
Dunia dan Cinta
Jostein Gaardner

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Black's Law
Dictionary
Bryan A. Garner
- 2 What the Dog Saw
Malcolm Gladwell
- 3 Inspiring Stories:
150 Kisah untuk
Menguatkan Hidup
Anda
Imelda Saputra
- 4 Manajemen HR:
Terobosan untuk
Mendongkrak
Produktivitas
Farid Poniman,
Yayan Hidayat
- 5 Menyimak Kicau
Merajut Makna:
Kumpulan Tweet
dari Akun
@salimafillah
Salim A. Fillah

Novel ini memuat banyak informasi dan panduan bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di Belanda. Penulis dengan jelas menuliskan tentang pengelolaan administrasi kampus, cara menggunakan transportasi umum, hingga rekomendasi tempat berlibur di sela kesibukan kuliah. Negeri Van Oranje juga telah hadir dalam versi layar lebar yang telah rilis dari tanggal 3 Desember 2015 lalu. Apakah filmnya akan mengikuti predikat "Best Seller" yang tersemat pada buku ini? Kita nantikan saja. Mari duduk manis dan ikut membaca serta menonton film persembahan anak negeri.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Bantimurung The Kinadom of Butterflies

Jelajah Sulawesi Selatan

Sudah punya rencana liburan akhir tahun? Tak ada salahnya mencoba plesiran ke Sulawesi Selatan. Tapi, sudah terlalu biasa rasanya jika hanya makan coto Makassar, berfoto di Pantai Losari atau mencicipi pisang epe. *Alhamdulillah*, saya dan teman-teman berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata lain di ujung selatan Pulau Sulawesi.

Destinas pertama kami adalah Taman Nasional Bantimurung, sekitar satu jam berkendara dari kota Makassar. Mata kami dimanjakan oleh indahnya air terjun yang diapit oleh lembah kapur. Airnya jernih dikelilingi oleh pepohonan hijau. Taman nasional ini juga dikenal sebagai *The Kingdom of Butterfly* karena memiliki sekitar 250 spesies kupu-kupu. Setelah lelah berkeliling, kami mampir ke toko kue untuk mencoba roti maros khas Makassar. Teksturnya yang lembut dipadu selai sarikaya begitu lezat disantap selagi hangat. Harganya pun terjangkau, hanya Rp10.000 untuk satu loyang besar. *Kenyaang!*

Perjalanan kami lanjutkan ke Tanjung Bira yang berada di Kabupaten Bulukumba. Kami berangkat dari kota Makassar pukul 9 malam dan tiba tepat pukul 2 pagi. Walaupun melewati *sunrise* karena bangun *kesiangan*, semua terbayar ketika kami menginjakkan kaki di pantai berpasir putih. Kombinasi antara birunya laut dan cerahnya mentari pagi membuat kami semua terpesona. Sengaja kami menyusuri pantai tanpa alas kaki, merasakan lembutnya pasir dan

Perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Bara. Sekali lagi menemukan lukisan Tuhan yang tesembunyi.

Tanjung Bira.



Indahnya pantai putih Sulawesi.



Foto
Masyitha
Mutiaara

jernihnya air laut.

Jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah sarapan, kami bersiap untuk *snorkeling*. Ada tiga pulau yang akan kami kunjungi, yakni Pulau Kambing, Pulau Liukang dan Pulau Bara. Tak sabar rasanya ingin segera berenang dan menikmati keindahan bawah laut Sulawesi. Kamipun bergegas menaiki kapal dan memakai peralatan *snorkeling*.

Sesampainya di Pulau Kambing, hamparan terumbu karang berwarna warni bisa dilihat dari atas kapal. Jernihnya air laut membuat kami bisa

melihat dengan jelas ikan-ikan kecil yang sedang berenang. Airnya pun sangat tenang. Kami tak berhenti mengucap syukur karena diberi kesempatan melihat ciptaan Tuhan yang indah.

Setelah dibekali beberapa trik *snorkeling* oleh sang *guide*, kami segera meluncur ke laut. Kami langsung disambut dengan ikan badut berwarna orange dan bintang laut berwarna biru. Ada pula ikan yang bercorak seperti zebra, berwarna-warni seperti pelangi, dan bahkan berwarna hijau menyala. Sesekali sekelompok ikan yang bersembunyi diantara terumbu karang muncul menyapa kami. Tak kalah dengan Pulau Kambing, Pulau Liukang juga menawarkan berjuta keindahan. Pulau ini memiliki lebih banyak ikan dibandingkan Pulau Kambing. Kami sengaja membawa roti untuk memberi makan ikan-ikan kecil.

Tak terasa hampir empat jam kami berkeliling di dua pulau ini. Setelah menikmati es kelapa dan ikan bakar di pinggir pantai, perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Bara. Sekali lagi menemukan lukisan Tuhan yang tersembunyi. Kami terkagum dengan indahnya pantai putih, jajaran pohon kelapa, dan gradasi birunya air laut. Di perjalanan pulang, kami disambut oleh sekawanan lumba-lumba. Kami sangat beruntung karena menurut nelayan di sana, lumba-lumba mereka hanya datang pada musim-musim tertentu.

Teks Masyitha Mutiaara Ramadhan



Foto
Twitter
@djenarmaesaayu

Berantas Korupsi Lewat Seni

Sha Ine Febriyanti bukan pelaku seni biasa. Lulusan SMA 54 Jakarta ini tak sekedar menelurkan kreasi seni untuk hiburan semata tetapi menghasilkan karya yang sarat makna.

Bermula dari pemilihan *cover girl* remaja tahun 1992, Sha Ine Febriyanti kemudian terjun ke layar kaca. Keterlibatan wanita kelahiran Jakarta, 18 Februari 1976 ini di sejumlah sinetron ternyata justru membuatnya tidak nyaman. Istri juru kamera Yudi Datou ini merasa bahwa menjadi model dan artis tak sesuai dengan kepribadiannya.

Di tengah kegelisahannya, Ine melibatkan diri di dunia teater. Sejak mendapatkan peran Miss Yuli, ia merasa menemukan jati dirinya. Akhirnya ia dipercaya bermain teater tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai ke mancanegara. Bahkan dalam rangkaian festival seni dan budaya Prancis, Ine tampil bersama dua penari asal Kolombia mementaskan naskah karya Ronan Cheneau berjudul *Warm*.

Naskah ini merepresentasikan imaji wanita terhadap sensualitas, maskulinitas dan eksotisme asmara. “Di Prancis kebetulan ada sutradara yang nawarin aktris Indonesia yang bisa ber-monolog. Aku berperan di stage dua kali bekerjasama dengan (disutradarai) David Bobee,” ujar pemeran tunggal film bertajuk *Nay*.

Selain seni peran, perempuan pertama yang mendapatkan beasiswa teater ke Busan, Korea tahun 2012 lalu ini juga sempat terlibat dalam pembuatan film *Selamat Siang Rissa* bersama Komisi Pemberantasan

Korupsi. Dalam film ini, Ine sebagai sutradara berupaya mensosialisasikan propaganda anti korupsi.

“Korupsi is everywhere,” kata Ine sebelum latihan monolog *Cut Nyak Dien* dikediamannya, Selasa (24/11). Setidaknya, menurut Ine, ada tiga penyebab terjadinya korupsi. Pertama, sistem yang masih memungkinkan seseorang melakukan korupsi. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, lumpuhnya integritas.

Ine bercerita setiap kali berkesempatan tampil di luar negeri, dirinya sempat membuat film dokumenter untuk meneliti bagaimana kehidupan penduduk di tempat tersebut. Misalnya, bagaimana potret korupsi di negara Jerman atau bagaimana cara masyarakat Prancis bisa disiplin menjaga kebersihan. Hasilnya ialah pemerintah yang tegas membuat peraturan.

Untuk itu, ibu tiga orang anak ini berharap agar pemerintahan baru ini bisa membawa perubahan. “Harus bisa lah, kita harus berubah. Rentetan (masalah) yang panjang, sulit dipangkas itu butuh keberanian, butuh pengorbanan. Sistemnya diperbaiki, (hukum) ditegakkan setegak-tegakanya. Kalau ada yang melanggar, hukum (diberi sanksi) yang benar,” tegasnya.

Teks lin Kurniati



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

BILLING ONLINE

Pembayaran bea masuk,
bea keluar, cukai dan
pajak dalam rangka impor
bisa melalui bank, ATM, internet banking
atau Kantor Pos terdekat.

*Mudah, Fleksibel
dan Real time*



Telah diujicobakan dan diwajibkan pada

1 Januari 2016

Unduh materi dan buku petunjuk di:

<https://goo.gl/BKN9nY>

<https://goo.gl/3OUEya>



"Connecting With Heart"



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Mulai Dari Satu Mulai dari Dirimu



Selamat Hari Sejuta Pohon Sedunia
10 Januari 2015

